



PT. ECOTROPICA



LAPORAN FINAL HASIL STUDI PEMETAAN

KAMARUDDIN
KETUA PENELITI

BIDANG
PENGEMBANGAN EKONOMI - EKOLOGI MASYARAKAT
(COMMUNITY EKONOMI DAN EKOLOGI DEVELOPMENT)

KABUPATEN PIDIE, KAB. PIDIE JAYA, KAB. BIREUN DAN KOTA SABANG

BIDANG EKONOMI - EKOLOGI

4 - 15 JUNI 2012

2012

kamaruddin.unimal@gmail.com/08139509273

DAFTAR ISI

SAMPUL

DAFTAR ISI

Prolog

A. KABUPATEN PIDIE

A.1 Gamnbaran Umum Kabupaten Pidie

A.2. Fasilitas Publik

A.3. Kondisi Pemerintahan

A.4. Perekonomian dan Ekologi

A.4.1. Sistem Perekonomian Masyarat Pesisir

A.4.2. Ketergantungan Ekonomi dan Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir

A.4.3. PDRB

A.4.4. Peternakan

A.4.5. Tanaman Bahan Makanan dan Perkebunan

A.5. Struktur Sosisl-Ekonomi

A.6. Kelompok Kepentingan

A.7. Masyarakat Menilai Tanah

B. KABUPATEN PIDIE JAYA

B.1 Gamnbaran Umum Kabupaten Pidie Jaya

B.2. Fasilitas Publik

B.3. Kondisi Pemerintahan

B.4. Perekonomian dan Ekologi

B.4.1. Ekonomi Mikro Pidie Jaya

B.4.2. PDRB

B.5. Struktur Sosial-Ekonomi

B.6. Kelompok Kepentingan

C. KABUPATEN BIREUEN

C.1. Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

C.2. Fasilitas Publik

C.3. Perekonomian dan Ekologi

C.3.1. Ketergantungan Ekonomi

C.3.2. Rumpon sebagai sumber ekonomi

C.3.3. Kenyamanan dan ekonomi

C.3.4. Perikanan dan Kelautan

C.3.5. Perindustrian

C.3.6. Pertanian dan Perkebunan

C.3.7. Peternakan

C.4. Ketenaga-kerjaan kabupaten Bireuen

C.5. Struktur Sosial Masyarakat Lokal

C.6. Kelompok Kepentingan

C.7. Masyarakat Menilai Tanah/ Lahan

D. KOTA SABANG

D.1 Gamnbaran Umum Kabupaten Pidie

D.2. Kesehatan

D.3. Pendidikan

D4. Kondisi Pemerintahan

D.5. Perekonomian dan Ekologi

E. PENUTUP

Rekomendasi dan saran

LAMPIRAN

a. Transkrip Wawancara

b. Observasi

c. Foto Dokumentasi

PROLOG

Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Blok Andaman III yang sudah mulai dilirik oleh investor. Pertambangan ladang minyak bumi dan gas alam tersebut juga menuntut perlunya sebuah pendekatan baru dalam pengelolaannya, utamanya yang berkenaan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk yang ada di sekitar ladang minyak dan gas tersebut. Ini menjadi sangat penting sebab ekseptasi dan apresiasi penduduk atas pengelolaan kawasan tersebut akan berhubungan erat dengan upaya mendukung tetap beroperasinya beberapa industri besar di Aceh.

Berkenaan dengan kenyataan tersebut, pengenalan terhadap karakteristik (*Community Economi Development*) di sekitar kawasan beroperasinya perusahaan tersebut akan sangat berguna oleh pengelola baru untuk menjamin kelancaran produknya di kemudian hari.

Dalam survey ini, Parameter Bidang Ekonomi-Ekologi yang akan dilihat adalah; Pola Matapencarian (perikanan, daerah penangkapan ikan, teknologi, dll), Tingkat Ketergantungan pada sumberdaya yang berkaitan dengan mata pencarian mereka (kegiatan berbasis perikanan), Akses terhadap modal ekonomi dan distribusi (termasuk pemasaran perikanan lokal dan perdagangan), Nilai ekonomi kegiatan perikanan bagi masyarakat, Infrastruktur Ekonomi Lokal, Angka Angkatan Kerja Lokal, Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan Desa (Village level)

Sumber data Primer dan Sekunder akan di analisis dengan Metode Deskriptif, Kualitatif dan kuantitatif, Bentuk Kegiatan: Proses pengenalan terhadap karakteristik masyarakat Aceh secara umum serta masyarakat yang ada di sekitar kawasan Aceh Pidie, Kabupaten Pijay, Kabupaten Bireun dan Kota Sabang dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya melalui pengamatan/observasi, diskusi intensif (FGD, wawancara) dan melalui studi dokumen. Dengan tujuan, antara lain: Mengidentifikasi struktur social-ekonomi dan ekologi masyarakat pesisir, mengidentifikasi kerentanan masyarakat pesisir di wilayah survey dalam konteks kehidupan masyarakat setempat dan ekonomi rumah tangga, memetakan stakeholder kunci dan peran mereka dalam dinamika sosial-ekonomi dan ekologi dan menyusun dan menetapkan rekomendasi untuk program masyarakat pesisir lokal dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hasil atau Output Studi yang diharapkan: Struktur ekonomi - ekologi dan pemetaannya, Pemetaan pelaku dalam konteks pengembangan struktur masyarakat, Pola interaksi social, ekonomi dan potensi konflik di masyarakat, Peran kelompok masyarakat dan gender dalam kelompok-kelompok sosial, Diskripsi peran dan partisipasi masyarakat miskin dan kelompok perempuan, Peta Permasalahan: Lingkungan, Infrastruktur, Kelembagaan, Bisnis, Mata Pencaharian, Air dan Sanitasi, Pasar, ekonomi, dan ekologi dan pedoman dan

referensi untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat khususnya Program CSR kedepan.

Waktu dan Metode Pengumpulan Data, sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa proses kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data awal yang diharapkan akan bisa memberi tambahan pengetahuan mengenai kondisi sosial, ekonomi dan ekologi masyarakat di Kabupaten Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireun dan Kota Sabang. Proses pengumpulan data dilakukan 4-15 Juni 2012.

Sementara itu, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut: *Observasi*, proses pengamatan yang dilakukan terhadap kehidupan masyarakat di Aceh Pidie, Pidie Jaya, Bireun dan Sabang. Pada awalnya hanya difokuskan pada beberapa kecamatan dan desa Pesisir yang dianggap memiliki kedekatan dengan Andaman III. Namun demikian, pada perkembangan selanjutnya pengamatan dilakukan berkembang pada desa-desa atau bahkan kecamatan yang pada mulanya dianggap tidak berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak/gas yang akan dilakukan. Kalau pada mulanya pengamatan hanya dilakukan di kecamatan dan Desa Pesisir, pada kenyataannya dilapangan juga di observasi kecamatan dan desa yang bukan katagori pesisir atau pedalaman dan Kota.

Pemilihan Kabupaten Pidie, Pijay, Bireun dan Sabang ini untuk diamati sebagian besar lebih didasarkan pada peta yang kami peroleh dari Tim Sosial Mapping yang kemudian kami bandingkan dengan kondisi terkini di lapangan. Hal yang diamati, selain berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi dan ekologi, juga meliputi kondisi dan pola pemukiman dan hal-hal lainnya yang dianggap relevan untuk membantu menjelaskan kondisi sosial ekonomi dan ekologi masyarakat.

Wawancara, proses yang dilakukan secara Individu dan tim secara umum bersifat wawancara bebas dan intensif. Wawancara bebas diartikan sebagai sebuah kegiatan wawancara untuk menggali data tanpa harus dirancang terlebih dahulu kondisi dan pada siapa wawancara dilakukan. Namun demikian penajaman materi wawancara juga dilakukan tim, dengan melakukan wawancara intensif terutama dengan person yang memiliki informasi mendalam tentang objek penelitian ini. Untuk wawancara intensif dilakukan oleh tim utama, sedangkan wawancara tim juga dibantu dengan enumerator (tim penggali data tambahan). Selama di lapangan, masyarakat yang berhasil diwawancarai memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam sehingga sedikit banyak bisa menggambarkan diferensiasi persepsi dan tanggapan tentang kondisi rill ekonomi dan ekologi.

Focus Group Discussion (FGD), rangkaian FGD dilakukan dengan harapan selain tergali data yang beragam dari banyak orang juga akan secara otomatis terjadi *cross check* data. Sampai dengan proses penggalian data selesai dilakukan telah berhasil dilakukan FGD. FDG dilakukan dengan Unsur PEMDA, Kelompok

kepentingan, Panglima Laot, KPA-KMPA, Tokoh Masyarakat, Geuchik, Umum Mukim, dan lain-lain.

Serta studi dokumen, studi ini dilakukan hanya sebatas pada dokumen yang memuat data sekunder seperti laporan berkala Badan Pusat Statistik, sebagian artikel koran serta beberapa buku yang memuat tentang sosial ekonomi dan ekologi di Kabupaten Pidie, Pijay, Bireun dan Sabang.

A. KABUPATEN PIDIE

A.1. Gambaran Umum Kabupaten Pidie

A.1.1. Geografis

Kabupaten Pidie secara geografis terletak pada 04,30° - 04,60° Lintang Utara dan ,75° - 96,20° Bujur Timur, dengan luas 3.562,14 KM². Ke arah Utara, Kabupaten ini berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya di Selatan, dan Kabupaten Pidie Jaya serta Kabupaten Aceh Besar di Timur dan Barat. Pemerintahan Kabupaten Pidie membawahi 23 Kecamatan yang mengelola 94 Kemukiman dan 731 Gampong (Pemerintahan Desa).

A.1.2. Demografi / Kependudukan

Jumlah Penduduk tahun 2010 adalah 379.108 jiwa (Laki-laki 183.964 jiwa, Perempuan 195.144 jiwa, Sex ratio 94,27%). Kepadatan rata-rata sebesar 106,43 Jiwa / KM². Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kec. Kota Sigli (18.829 jiwa), sementara Kecamatan terendah jumlah penduduknya adalah Kec. Geumpang (6.008 jiwa). Kec. Kota Sigli juga adalah Kecamatan dengan kepadatan tertinggi (1.931,18 jiwa / KM²). Dan Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kec. Mane (9,40 jiwa / KM²). Pertumbuhan penduduk sejak 2008 sampai 2010 menunjukkan kecenderungan penurunan, pada tahun pertama (2008) sebesar 1,53%, tahun 2009 sebesar 1,51%, dan tahun 2010 sebesar 1,46%.

A.2. Fasilitas Publik

A.2.1. Jalan dan Jembatan

Ruas jalan Negara telah diaspal seluruhnya memiliki panjang total 154.920 KM. Jalan Provinsi memiliki total panjang 292.970 KM, sepanjang 253.240 KM di antaranya telah beraspal, sisanya kerikil. Total jalan Kabupaten sepanjang 1.840.370 KM (522.170 KM beraspal, 117.700 KM kerikil, 75.500 KM tanah, dan sepanjang 1.125.000 KM tidak diperincikan)¹. Secara umum, situasi jalan di Kab. Pidie telah baik, akses ke pedesaan pun secara umum telah mudah dilalui kendaraan roda empat.

¹ Sumber: Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pidie, sebagaimana tercantum dalam Pidie Dalam Angka 2011.

A.2.2. Kuala/TPI/PPI

Kabupaten Pidie, sampai akhir 2010 memiliki 1 PPI dan 4 TPI, yang tersebar di 5 Kecamatan, dengan produksi dan nilai produksi pada 2009 dan 2010 sebagaimana dalam tabel I berikut:²

PPI / TPI	Produksi (Ton)		Nilai Produksi (Juta Rupiah)	
	2009	2010	2009	2010
PPI Kuala Peukan Baro	1.025,65	3.018,09	13.333,45	11.005,00
TPI Muara Tiga	769,24	1.168,87	10.000,12	9.722,00
TPI Batee	897,44	2.800,75	11.666,72	10.901,00
TPI Kembang Tanjong	940,19	1.028,28	12.222,47	9.310,00
TPI Simpang Tiga	641,04	1.233,78	8.333,52	6.634,00
Jumlah	4.273,56	9.249,77	55.556,28	47.572,00

Data Perikanan

- a. Luas Areal Budidaya Perikanan di Kabupaten Pidie, Tahun 2010 :
3.525,89Ha
 - Budidaya : 3166,89Ha (3.097,00Ha Tambak, 69,89Ha Kolam)
 - Perairan Umum : 359Ha (307,00Ha Sungai, 52,00Ha Waduk)
- b. Produksi Ikan: 14.537,70 Ton
 - Perikanan Darat : 10.264,2Ton (8.284,90Ton Tambak, 1.979,30Ton Kolam)
 - Perikanan Laut : 4.273,50Ton
- c. PPI dan TPI di Kabupaten Pidie: PPI Kuala Peukan Baro, TPI Muara Tiga, TPI Batee, TPI Kembang Tanjong, TPI Simpang Tiga.
- d. Banyaknya Armada Perikanan: 373 Unit (349Unit Kecil, 24Unit Besar)

Data Lahan Kawasan Budidaya

² Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pidie, sebagaimana tercantum dalam Pidie Dalam Angka 2011.

Tabel 2
Luas Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten Pidie, Tahun 2010³

No.	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Kawasan telah digunakan		
	a. Perkampungan	12.295	2,96
	b. Perkebunan	7.804	1,88
	c. Sawah	36.400	8,75
	d. Kebun Campuran	11.488	2,76
	e. Tambak	5.744	1,38
02.	Kawasan yang belum digunakan		
	a. Tegalan, Ladang	2.944	0,71
	b. Rawa, danau, alang-alang, tanah tandus	44.248	10,64
	c. Hutan Belukar	97.532	23,44
	d. Semak	22.890	5,50
	e. Hutan Lebat	174.244	41,88
	f. lain-lain	466	0,10
Jumlah		416.055	100,00

A.2.3. Rumah Sakit dan Hotel

Kabupaten Pidie, sampai akhir 2010 telah memiliki 1 Rumah Sakit Umum milik Pemerintah dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 146 unit. Total tenaga medis dalam berbagai disiplin kepakaran berjumlah 34 orang, tenaga paramedic non-perawat sebanyak 93 orang, paramedic perawat 234 orang, dan sebanyak 79 orang pegawai non medis⁴. Tersedia 1 Hotel, 2 Wisma, dan 4 Losmen dengan tariff per malam inap antara Rp35.000,- s/d Rp450.000,- untuk kepentingan akomodasi pengunjung dari luar daerah⁵.

A.2.4. Pendidikan⁶

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) TA 2010/2011
- Jumlah Sekolah : 77 unit (7 Negeri dan 70 Swasta)
 - Jumlah Kelas : 144 unit (13 Negeri dan 131 Swasta)
 - Jumlah Pelajar Tahun 2010 : 4.441 orang (446 Negeri dan 3.995 Swasta)
 - Jumlah Guru : 590 orang (105 Negeri dan 485 Swasta)

³ Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie

⁴ Sumber: Rumah Sakit Umum Sigli, 2011

⁵ Sumber: Hasil Survei (V-HTL) BPS Kabupaten Pidie

⁶ Sumber data primer hasil observasi dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Pidie, 2010

- b. Sekolah Dasar (SD) TA 2010/2011
- Jumlah Sekolah : 306 unit (289 Negeri dan 17 Swasta)
 - Jumlah Kelas : 1979 unit (1.824 Negeri dan 155 Swasta)
 - Jumlah Pelajar : 41.171 orang (40.170 Negeri, 1.001 Swasta)
 - Jumlah Guru : 2.237 orang (2.136 Negeri, 101 Swasta)
 - Jumlah Lulusan : 10.562 orang (5.400 Laki-laki, 5.162 Perempuan)
 - Jumlah Siswa SD yang putus Sekolah : 12 orang (8 Laki-laki, 4 Perempuan)
- c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) TA 2010/2011
- Jumlah Sekolah : 53 unit (49 Negeri, 4 Swasta)
 - Jumlah Kelas : 577 unit (551 Negeri, 26 Swasta)
 - Jumlah Pelajar : 15.622 orang (15.083 Negeri, 539 Swasta)
 - Jumlah Guru : 1.186 orang (1.153 Negeri, 33 Swasta)
 - Jumlah Lulusan : 4.607 orang (2.332 Laki-laki, 2.275 Perempuan)
 - Jumlah Siswa yang putus Sekolah : 62 orang (43 Laki-laki, 19 Perempuan)
- d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) TA 2010/2011
- Jumlah Sekolah : 26 unit (22 Negeri, 4 Swasta)
 - Jumlah Kelas : 414 unit (391 Negeri, 23 Swasta)
 - Jumlah Pelajar : 12.900 orang (12.378 Negeri, 522 Swasta)
 - Jumlah Guru : -- orang (tak ada data)
 - Jumlah Lulusan Total (SMU dan SMK): 4.162 orang
 Jumlah Lulusan SMU: 3.509 jiwa (1.454 Laki-laki, 2.055 Perempuan)
 Jumlah Lulusan SMK: 653 jiwa (497 Laki-laki, 156 Perempuan)
 - Jumlah Siswa yang putus Sekolah (SMU dan SMK) : 74 orang
 Jumlah Siswa SMU yang putus sekolah : 69 jiwa (49 Laki-laki, 20 Perempuan)
 Jumlah Siswa SMK yang putus sekolah 5 orang (4 Laki-laki, 1 Perempuan)

Terhitung sejak tahun 2000an bidang pendidikan sudah terjadi peningkatan, secara umum 54% adalah tamatan SMA dan rata-rata \pm 40% melanjutkan keperguruan tinggi (PT/PTS), 1,3 % tamat SMP dan 0,4 % tamat SD. Sedangkan untuk bidang kesehatan, penyakit yang sering di derita oleh masyarakat Kembang Tanjong adalah penyakit ISPA, CC, dan GASTRIK, menurut laporan puskesmas penyakit tersebut diakibatkan oleh pengaruh cuaca, makanan dan air. Pengetahuan masyarakat tentang konsumsi makanan dan minuman masih sangat rendah.⁷

⁷Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Khalik, S.Sos, Sekcam Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, Rabu 6 Juni 2012 dan data sekunder diambil dari berbagai sumber lain

A.3. Kondisi Pemerintahan

Jumlah Anggota DPRK Pidie 2009-2014 sebanyak 45 orang, didominasi Fraksi Partai Aceh seramai 34 orang, dan Fraksi Gabungan seramai 11 orang⁸. Sejumlah 9.995 penduduk berprofesi sebagai PNS dalam berbagai golongan dan jabatan (Gol. I 324 orang, Gol. II 3.368 orang, Gol. III 3.266 orang, dan Gol. IV 3.037 orang)⁹.

A.4. Perekonomian dan Ekologi Kab. Pidie

Perekonomian masyarakat di Kab. Pidie mencakup pertanian, perikanan darat dan laut, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Luas Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten Pidie ¹⁰:

- Kawasan telah digunakan :
 - Perkampungan : 12.295Ha = 2,96%
 - Perkebunan : 7.804Ha = 1,88%
 - Sawah : 36.400Ha = 8,75%
 - Kebun Campuran : 11.488Ha = 2,76%
 - Tambak : 5.744Ha = 1,38%
- Kawasan yang belum digunakan:
 - Tegalan, Ladang : 2.944Ha = 0,71%
 - Rawa, danau, alang-alang, tanah tandus : 44.248Ha = 10,64%
 - Hutan Belukar : 97.532Ha = 23,44%
 - Semak : 22.890Ha = 5,50%
 - Hutan Lebat : 174.244Ha = 41,88%
 - Lain-lain : 466Ha = 0,10%

A.4.1. Sistem Perekonomian

Perekonomian di kabupaten Pidie, hampir sama dengan kabupaten pesisir lain di Aceh. Daerah pesisir biasanya menggantungkan ekonomi darui melaut/nelayan dan petani tambak. Pesisir laut dan tambak masyarakat masih kurang produktif karena sejak tahun 1990 sampai saat ini Udang tidak mau hidup lagi. Masyarakat banyak memelihara Bandeng dan budidaya nener Bandeng, Seperti di beberapa Gampong Kecamatan Pidie, Kecamatan Kembang Tanjung, kecamatan Simpang Tiga dan Laweung.

Selain itu, kuala/kreung yang mulai dangkal, termasuk saluran tambak juga dan jalan apalagi jalan desa/gampong di sana juga rusak, bahkan hampir semua jalan di kabupaten Pidie. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik semasa Gubernur Irwandi Yusuf. Banyak program-program untuk kabupaten Pidie di pangkas. Masa Bupati Pak Mirza Ismail, S.Sos, periode 2007-2012 kurang harmonis dengan Gubernur Irwandi Yusuf. Tapi dari pihak pemerintah dan pengusaha

⁸ Sumber: DPRD Kabupaten Pidie

⁹ Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pidie

¹⁰ Sumber: BPN Kabupaten Pidie

tidak pernah turun tangan memperbaiki jalan. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun sampai saat ini.

Informasi dari KPA/PA dan KMPA Pidie mengharapkan proses pembangunan ekonomi di Pidie mulai tahun ini (2012) mesti dijalankan dengan baik. Termasuk kalau ada pihak yang ingin meng-eksplorasi di Kabupaten Pidie. Dan yang terpenting ke depan perlu koordinasi para pihak sehingga tidak ada masalah ke depan. Mereka siap bekerjasama dengan perusahaan yang masuk dan tidak akan mempersulit prosesnya.

Dipahami bersama bahwa, pembangunan Aceh, termasuk ekonomi, tidak bisa dipisahkan dengan situasi politik dan keamanan. Kenyamanan Aceh, akan membawa dampak baik bagi ekonomi. Pidie dan Aceh umumnya, sangat berharap kenyamanan dan keamanan tercipta dengan baik secara alamiah, sehingga siapapun yang masuk ke Pidie, akan mudah dan rasa nyaman. Masyarakatpun dapat berusaha mencari nafkah dengan baik. Kita tidak mengharapkan ribut-ribut lagi.

Semua proses pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, Pidie nasional dan pihak asing/internasional di Aceh, mesti mengacu pada MoU dan UUPA. Kalau semua poin-poin dalam MoU dan UUPA di terapkan dengan baik semua dapat berjalan lancar. Dalam MoUpun tentang kewenangan ekonomi¹¹ Aceh dijelaskan Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.

¹¹ Berkaitan dengan ekonomi Aceh, dalam MoU Helsinki tahun 2005 dijelaskan dalam poin 1.3. Ekonomi: 1.3.1. Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia). 1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh. 1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. 1.3.4. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh. 1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh. 1.3.6. Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya. 1.3.7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara. 1.3.8. Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh. 1.3.9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami.

UUPA menetapkan bahwa setiap ada program pemerintah yang akan dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan luar negeri perlu berkonsultasi dengan pemerintah Aceh baik legislatif maupun eksekutif. Apalagi pihak perusahaan Asing, tentu perlu dilakukan koordinasi dengan semua pihak di Aceh. Kita mengharapkan agar beberapa peraturan pemerintah pusat yang diamanatkan oleh UUPA, yang harus melalui proses konsultasi yang disebutkan di atas, dikeluarkan sesegera mungkin. Terutama untuk Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bersama atas Sumber Daya Minyak dan Gas oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Karena ini yang menjadi konflik serius bagi kedua belah pihak.¹²

Aceh Pidie sampai saat ini belum memiliki sistem hirarki dan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7/2007. Aceh Pidie juga belum memiliki rencana tata ruang dan wilayah. Di Aceh Pidie sudah memiliki tuasan (*rumpon*), namun tidak memiliki titik ordinat yang jelas. Kecamatan yang ada Garis pantai lima kecamatan.

Sejarah *tuasan (rumpon)* di Aceh Pidie adalah dibangun oleh para pengusaha. Jumlah kapal besar adalah 37 kapal besar (30 GT ke atas). Jadi jumlah rumpon adalah 74 buah. Masing-masing kapal besar itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Ada satu pengusaha yang memiliki dua hingga tiga kapal besar. Jarak antara rumpon besar kira-kira 6-7 jam perjalanan. Di Aceh Pidie yang menguasai laut adalah *pang laot*. Dia juga seorang pengusaha. Strukturnya di bawah panglima laut kabupaten membawahi panglima panglima lhok, yang biasa dalam satu kecamatan ada dua panglima *lhok*.

Untuk rumpon yang laut dangkal jaraknya bisa sejak 1-2 mil. Boat penjaga rumpom disebut boat cewek, yang dengan alat mesin kapal 6-10 GT. Konflik antar-pemilik kapal terkait dengan masalah pembagian hasil rumpon. Selama ini untuk meredakan konflik dibuat peraturan bahwa jarak antara satu rumpon dengan rumpon lain adalah minimal dua mil. Di Pidie tidak ada konflik dengan pukut harimau. Dinas Kelautan dan Perikanan juga pernah mengupayakan pembuatan rumpon yang kemudian hasilnya diberikan kepada kapal-kapal kecil (2 GT).

Kuala yang besar di Pidie adalah Kuala Pekan Baro (Kecamatan Sigli). Adapun luas tambak di Pidie adalah 3228 hektar. Ikannya bandeng. Sedikit ada udang. Tambak-tambak ini tersebar di tujuh kecamatan. Pengelolaan tambak ditangani oleh Badan Musyawarah Petani Tambak (BMPT). Untuk tambak di Pidie selama ini menurun produksi udang, namun untuk bandeng produksi meningkat. Untuk program intensifikasi masih belum berjalan. Yang berjalan adalah yang semi intensif. Selama ini pengolahan bandeng masih dilakukan secara tradisional, yaitu bandeng teupeuh (tanpa duri). Problemnnya pengembangannya adalah pada

¹² Sumber data primer hasil FGD dengan pihak KPA/PA dan KMPA Wilayah Pidie, 5-6 Juni 2012 serta data sekunder.

packaging dan pengolahan yang bisa bertahan lama. Struktur sosial masyarakat menjadi rusak oleh bantuan pasca-tsunami. Potensi mangrove di Pidie saat ini sangat kurang. Proses perusakan mangrove sudah terjadi sejak sebelum tsunami.

Salah satu yang menyebabkan Pidie masuk kabupaten termiskin karena indeks pembangunan manusianya yang lemah. Saat ini, jumlah penduduk miskin di Pidie adalah 25,8 persen. Problem lainnya adalah daya konsumsi yang tinggi tanpa dibarengi produktivitas yang tinggi. Ini dengan adanya kemudahan mengambil kredit seperti sepeda motor dan kredit lainnya. Setelah ada sepeda motor pun bukan lebih giat bekerja, tapi lebih banyak berjalan-jalannya.¹³

A.4.2. Ketergantungan Ekonomi dan Mata Pencarian

Di desa peisisir Pidie, tidak ada alternative kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan selain melaut. Ketergantungan dengan laut sudah terjadi sejak zaman dahulu. Pada dasarnya masyarakat sangat tertarik dengan laut, selain itu, di kampung tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan selain pergi ke laut. Umumnya masyarakat di Pidie banyak yang bekerja sebagai nelayan, sebab sebagian besar wilayah kabupaten Pidie berada di daerah pesisir.

Masyarakat nelayan di Desa pesisir Pidie telah memiliki suatu sistem adat kehidupan nelayan yang dengannya mereka menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi antar-sesama. Para nelayan juga punya kelompok, yaitu kelompok Gurita dan Tenggeri. Mereka saling bersatu dan saling membantu. Konflik antar nelayan dalam memperebutkan sumber ekonomi dan ketergantungan dengan laut tidak ada yang berarti, mereka selalu mengutamakan mufakat. Kalaupun terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan merujuk pada adat istiadat, qanun serta aturan yang berkenaan dengan masalah laut.

Ada beberapa metode dan alat (penangkapan ikan) yang digunakan, untuk boat besar menggunakan jaring dan pukut sedangkan untuk kecil ada juga yang menggunakan jaring tapi kebanyakan menggunakan pancing. Selain itu ada juga yang menggunakan *nyap* dan *Jermai*. *Jermai* (jermal) itu semacam bagan (rumah ikan) yang dibuat di dalam laut dengan jarak lebih kurang 500 meter dari bibir pantai. Di bawah bagan tersebut dipasang jaring dan ketika ikan masuk ke dalam jaring itu, diangkat ke atas. Hampir segala jenis ikan dapat. Tapi yang sering dapat itu ikan tongkol, cumi-cumi, merah mata, *jinara*, kembung, udang, *kadra*, kepala batu, *cuale*, dsb.

¹³ FGD dengan Pejabat Pemda Pidie 5 Juni 2012, Hotel Grand Blang Asan (Pak Said Sekda Pidie, Said Ramadhan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Muhammad Adam, Sekretaris Bappeda Pidie, Ishak, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Banyak tambak yang tidak difungsikan di Desa pesisir Pidie, karena tidak ekonomis dibandingkan melaut. Tambak banyak yang tidak difungsikan karena perawatannya susah serta membutuhkan terlalu banyak modal dan hasilnya sedikit.

Cuaca ekstrim adalah *musuh* utama nelayan Sigli, selain semakin menipisnya populasi ikan di perairan dangkal, juga pencemaran, pendangkalan, dan harga bahan bakar perahu motor yang melambung. Masalah yang paling berat menantang adalah jika saat pergantian musim timur ke musim barat seperti saat ini. Hampir 3 bulan nelayan tidak bisa berlayar karena cuaca sangat ekstrim, angin kencang dan gelombang yang sangat besar. Apabila dipaksakan berlayar maka resikonya terlalu besar dan ikannya pun belum tentu dapat. Kurun waktu beberapa tahun ini ikannya juga sudah sangat jarak dari bibir pantai jadi mereka terpaksa ke tengah laut sampai 12 mil, kadang-kadang ketika ikannya tidak ada harus hijrah ke wilayah barat dan sampai ke laut Thailand. Masalah lain adalah dangkalnya kuala-kuala di Pidie serta banyaknya sampah-sampah di sungai sehingga ketika air surut perahu kami tersangkut. Saya sangat berharap pemerintah memperbaiki kedangkalan tersebut, dan BBM pun sudah sangat mahal tidak sesuai dengan hasil tangkapan masa sekarang.

Selain itu, kaum wanita juga bertindak membantu menyokong perekonomian keluarga, kerena kebanyakan nelayan tidak memiliki mata pencaharian lain selain melaut. Bila tidak dapat berlayar karena keadaan cuaca sedang tidak baik, maka tidak ada pekerjaan lain kecuali duduk di rumah. Istri yang akan membantu bekerja mencari nafkah keluarga dengan menganyam tikar, dan kaum laki-laki hanya membantu istri mencari bahan untuk menganyam.

Pembinaan dan bantuan modal dari pememrintah masih dirasa kurang. Banyak nelayan mengajukan proposal tapi tidak pernah berhasil. Permohonan bantuan peralatan nelayan seperti jaring, mesin boat, pancing, dan kebutuhan nelayan lainnya. Proposal dikirim ke kantor Gubernur Aceh dan juga ke Bupati Pidie tapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Padahal mereka berharap pemerintah mau membantu kami nelayan ini.

Komunitas nelayan di pesisir Pidie, seperti juga komunitas nelayan di wilayah lain Aceh, dipimpin oleh seorang Panglima Laot (Kepala Pemerintahan Adat Laut yang membawahi sekumpulan nelayan dalam suatu wilayah perairan). Yang disayangkan Panglima Laot tidak berfungsi bahkan jarang nampak.

Penghasilan nelayan bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi, karena sangat bergantung pada beberapa hal yang di luar kendali nelayan itu sendiri. Kalau mengenai penghasilan, jangankan perhari, perbulan saja susah diprediksi. Penghasilannya menurut *rezeki nelayan*. Jika ada dapat ikan, maka ada rezeki dan apabila tidak maka tidak dapat apa-apa kecuali dapat capek. Biasanya kalau pendapatan nelayan bervariasi, mulai dari nol sampai 500.000 Rupiah. Memang pernah dulu ada sekali nelayan dapatnya sampai 30juta Rupiah.

Pentingnya keterlibatan berbagai pihak terutama Pemerintah dalam peningkatan taraf hidup nelayan di pesisir Sigli, berharap kepada semua pihak khususnya Pemerintah Daerah agar dapat memperhatikan dan membantu permodalan kepada nelayan agar hidup sejahtera dan tidak bergantung hidup kepada orang lain. Diharapkan juga, ada pemerintah atau pihak tertentu untuk berinvestasi dan membuat perusahaan, asalkan mereka diperhatikan dan tidak dikorbankan maka sangat senang jika pemerintah atau siapa saja yang mau peduli dengan nasib kami khususnya nelayan ini.¹⁴

Kegiatan ekonomi utama masyarakat di Kecamatan pesisir Pidie di kecamatan Kembang Tanjung, didominasi oleh kelautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan dan sebagian kecil perdagangan. Rata-rata penduduk Kecamatan Kembang Tanjung bekerja sebagai petani / pekebun, nelayan, melaut dan sebagian kecil adalah pedagang.

Keterlibatan Pemerintah dalam program pengembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan ini lumayan berjalan dengan baik, ada juga bantuan pemerintah bagi perekonomian masyarakat. Selama ini program PNPM-BKPG berjalan dengan baik. pihak Pemerintah Kecamatan tetap berusaha untuk memberdayakan perekonomian masyarakat Kembang Tanjung, seperti memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam bidang nelayan dan pertanian.

Masalah yang dihadapi nelayan dan petani adalah saluran air untuk tambak dan sarana irigasi yang tidak layak pakai, di mana aliran airnya tidak lancar. Selain itu, beronjong perlu dibangun sepanjang aliran sungai Tiro serta batu pemecah ombak juga harus dibangun disepanjang pesisir yang berdekatan dengan pemukiman warga, kedua hal ini sering dikeluhkan oleh masyarakat Kembang Tanjung sebab sering terjadi banjir dan abrasi sungai dan laut. Ada tiga gampong yang rawan terjadinya banjir danabrasi tersebut, yaitu gampong Pasie Lancang, Pasie Lhok dan Jeumerang.

Berkaitan dengan sumber Migas, dulu di daerah lepas pantai pernah diteliti oleh pemerintah pusat, dan hasilnya katanya di daerah ini terdapat kandungan Migas, akan tetapi pasca konflik hal ini tidak terdengar lagi. Kemudian ada isu rencana akan dibangun jembatan yang menghubungkan gampong Jeumerang dengan Pusong, jika dilihat dari segi objektifitas maka rencana pembangunan jembatan tersebut sangat tidak layak dilihat dari segi mamfaatnya, tentu saja ini ada indikasi bahwa di daerah Keumang Tanjung terdapat sumber kekayaan alam yang dirahasisakan. Satu sisi kita tidak sepakat apabila masyarakat kemudian yang harus dikorbankan, jika benar ada potensi alam migas dan pemerintah atau

¹⁴ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Zainal Abidin (55), Nelayan, Sigli, Pidie, 5 Juni 2012 serta sumber data sekunder.

pihak lain yang akan membangun perusahaan, namun apabila hal tersebut dapat bermamfaat bagi masyarakat akan kita pertimbangkan lagi ¹⁵.

Bagi sebagian ibu rumah tangga di Kembang Tanjung, mengurus anak-anak ini menjadi rutinitas setiap hari. Sebagian ada yang membuat kerupuk melinjau / kerupuk *muling*, membuat telur asin serta jual kelontongan, kegiatan ini setidaknya dapat membantu (memenuhi) kebutuhan keluarga, memberi jajanan anak di sekolah. Selama ada program PNPM dan BKPG, para perempuan sudah membentuk dua kelompok simpan pinjam, yaitu kelompok INGIN DAGANG dan Kelompok HUDEP SARE. Mereka juga ada kelompok Majelis Ta'lim perempuan, setiap Senin melakukan pengajian rutin. Tentunya berharap perempuan ke depan harus aktif dan partisipatif dalam berbagai kegiatan demi tersalurnya kebutuhan dan keluhan perempuan, yang pertama sekali dengan meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan, baik pendidikan umum maupun pendidikan ilmu agama.¹⁶

Masih di Kembang Tanjung, Geuchik Raflan, Keude Ie Leubeu, Kec. Kembang Tanjong, Pidie, menggambarkan sulitnya mendapatkan asistensi Pemerintah demi peningkatan ekonomi masyarakatnya, Jabatan seperti keuchik sebenarnya tidak ada program yang besar-besaran, dapat menjalankan tugas dan kewajiban untuk mengabdikan kepada masyarakat itu sudah sangat lumayan. Selama ini saya mengupayakan agar ada bantuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor nelayan, tambak dan petani garam, yang terealisasi hanya bantuan untuk petani garam yang lain belum ada.

Kegiatan ekonomi utama masyarakat Keude Ie Leubeu tertumpu pada tiga sektor. Umumnya bekerja sebagai Nelayan, Petani Garam dan Petani Tambak serta bertani. Tiga sektor inilah yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat, dan masyarakat sangat tergantung pada tiga sektor tersebut. Sementara kaum ibu menyokong perekonomian keluarga melalui usaha terkait hasil perkebunan pembuat kerupuk muling (kerupuk melinjo). Sangat sedikit yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Pada umumnya tambak-tambak merupakan milik pribadi yang dikelola sendiri oleh masyarakat, untung dan ruginya juga ditanggung sendiri. Ada juga yang mengelola secara bersama, dengan cara bagi hasil. Bagi hasil ini biasanya antara pemilik modal dengan pengelola tambak membuat kesepakatan tentang bagi hasil, cara pembagiannya tergantung kesepakatan kedua-belah pihak. Untuk menjadi seorang petambak biasanya membutuhkan modal awal dari 5juta s/d 10juta. Modal tersebut hampir sama dengan modal awal seorang nelayan.

¹⁵ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Khalik,S.Sos. Sekcam Kembang Tanjong, Pidie, di Kembang Tanjong, Pidie, Rabu 6 Juni 2012 serta sumber data sekunder.

¹⁶ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Juni 2012 Suryati (ketua PKK Gampong Keudeu Ie Leubeu), Kemang Tanjong, Pidie, 6 Juni 2012 serta sumber data sekunder.

Jenis budidaya tambak yang diusahakan masyarakat di Keude Ie Leubeu bervariasi dari udang, bandeng, juga mujair. Ada sekitar 100 tambak di gampong Ie Leubeu ini dan hanya ada satu kelompok petani tambak yaitu kelompok CEMPAKA yang terdiri dari 6 orang anggota. Sedangkan untuk nelayan nama kelompoknya PAUS JAYA dengan anggota 10 orang.

Masalah utama yang dialami petani tambak adalah banjir bandang serta ketika terjadi pasang air laut. Ikan-ikan bisa mati dan hilang dibawa banjir. Begitu juga halnya dengan petani garam, kalau musim hujan atau banjir dan pasang air laut mereka harus menanggung kerugian yang sangat besar. Semestinya untuk masyarakat pesisir yang rata-rata bekerja sebagai nelayan harus ada perhatian pemerintah, setidaknya adalah sosialisasi atau penyuluhan untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Yang lebih menyedihkan masyarakat tidak ada pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada lahan persawahan yang dapat digarap. Ketika saat menjepit seperti tadi, maka membantu istri untuk membuat kerupuk melinjau (kerupuk muling) dan sangat sedikit yang mendapatkan pekerjaan sebagai buruh bangunan.

Selayaknya wilayah pesisir Aceh lain, para nelayan bernaung di bawah pimpinan Panglima Laot (Kepala Pemerintahan Adat Masyarakat Nelayan dalam suatu kawasan perairan), demikian pula halnya di Gampong Keude Ie Leubeu, Ada dua Panglima Laot disini, yaitu Panglima Laot Lhok Kuala Ieu Leubeu, (bernama) Abdullah, dan Panglima Laot Lhok Kuala Jeumeurang, (bernama) Jakfar. Fungsi dan peran Panglima Laot tidak terlalu besar, paling hanya mengurus masalah keamanan di laut, seperti memantau keadaan cuaca laut, mengorganisir para nelayan, menyelesaikan sengketa yang terjadi di laut serta melarang nelayan berlaut pada malam Jum'at.

Selama ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah baik Kabupaten maupun Propinsi. Kalau setelah tsunami memang ada berbagai bantuan yang masuk ke daerah pesisir termasuk gampong ini. Tapi hanya diberikan kepada para petani garam. Bentuknya adalah pembangunan dapur, bantuan belanga, serta pembangunan/perbaikan rumah tempat memasak garam yang disebut *'lancang sira*. Masalah lain yang dihadapi warga Keude Ie Leubeu adalah air bersih, "Masyarakat di sini sulit mendapatkan air bersih, terkadang air sumur juga ada yang asin, dulu dari PDAM sudah menanam pipa saluran air bersih tapi sampai saat ini belum berfungsi.

Kalau bisa kita katakan usaha yang ada hanya pembuat garam itu pun susah sekali ketika proses produksinya. Sebenarnya sektor pembuatan garam ini dapat menjadi potensi perekonomian masyarakat karena bahan baku dan pengelolaannya sangat mudah tapi ini juga terkendala ketika diproduksi.

Masyarakat di Gampong Ie Leubeu sangat mendukung ini didirikan sebuah perusahaan pemerintah atau swasta, "Saya sangat setuju itu, masalahnya

sekarang apakah pemerintah mau nggak? Sebab setahu saya di sini tidak ada yang mesti dikelola selain sektor kelautan, budidaya ikan atau pembuatan garam. Beda dengan daerah lain seperti Lhokseumawe, yang penting masyarakat sejahtera. “Setiap perbuatan pasti ada resikonya, namun yang terpenting komitmen pemerintah atau perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar memperoleh keuntungan saja. Selama tidak merugikan masyarakat, kenapa tidak?”.¹⁷

Kabupaten Pidie, khususnya kecamatan kota, masih terdapat beberapa Gampong yang masih memiliki hutan mangrove. Memang tidak selebat hutan mangrove yang terdapat di Gampong Pasie Ie Leubeu Simpang Tiga, namun di kota Sigli inilah hutan mangrove atau dalam bahasa Aceh disebut dengan *bak bangka* yang paling lebat.

Salah satunya di Gampong Rawa, Jalan menuju gampong Rawa ini cukup buruk, jalan aspal yang sudah terkelupas. Di gampon ini juga dipenuhi sampah. Sistem drainase tidak berjalan dengan baik karena penuh tumpukan sampah. Terlihat bahwa kampung ini seperti tidak terjangkau oleh dinas kebersihan kota, padahal jarak dengan kota kurang dari 5 km.

Hutan mangrove yang ada di kampung rawa ini adalah hutan yang ditanam setelah tsunami. Penanaman ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat pemilik tambak, karena mangrove bukan hanya baik untuk menghindari abrasi tapi juga untuk penangkaran nener dan juga sarang bagi kepiting dan ikan. Pohon mangrove yang paling tua di kampung ini ditanam sekitar tahun 2007 atau setelah tsunami.

Di kampung ini juga ternyata ada usaha rumah tangga, yaitu pembuatan tikar. Pembuatan tikar di kampung ini dilakukan oleh masing-masing keluarga. Mereka mampu memproduksi satu tikar dengan pengerjaan selama tiga hari per orang. Semua keterampilan pembuatan tikar di kampung ini dilakukan oleh perempuan. laki-laki melakukan pekerjaan yang lain seperti menjadi supir angkota kota atau kerja serabutan lainnya, termasuk memasarkan tikar-tikar yang diproduksi oleh para perempuan. Untuk satu unit usaha ada sekitar 4-5 pekerja dan semuanya memiliki ikatan darah. Untuk sebuah tikar kecil ukuran satu orang dewasa tidur dijual dengan harga Rp. 50 ribu.

Dikampung ini dikenal sebagai kampung produsen tikar pandan. Ada sekitar 40-50 industri rumah tangga di kampung ini yang memproduksi tikar. Sebagai model usaha kecil, bisnis ini berjalan dengan baik tanpa ada politik untuk saling membunuh usaha milik orang lain. Dari hasil pengamatan, karena produksi tikar ini didasarkan pada masing-masing keluarga, ternyata kualitas tikar juga tidak

¹⁷ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Geuchik Raflan Gampong Keude Ie Leubeu, Kec. Kembang Tanjong, Pidie Rabu, 6 Juni 2012 serta sumber data sekunder.

sama. Untuk kualitas yang kurang baik dijual dengan harga di bawah Rp. 50 ribu rupiah, seperti Rp. 45 ribu – Rp. 40 ribu.¹⁸

A.4.3. PDRB

PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) Kabupaten Pidie Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2009 adalah Rp. 3.580.353,71 juta, sedangkan bila diukur Atas Dasar Harga Konstan adalah sebesar Rp 1.636.634,45 juta. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada 2009 adalah sebesar Rp. 9.564.417,77. Sementara Pendapatan Regional Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun yang sama adalah sebesar Rp 9.062.422,97. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan pada 2009 adalah sebesar Rp. 4.372.041,66. Sementara Pendapatan Regional Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun yang sama adalah sebesar Rp 4.137.469,37.

Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kab. Pidie pada 2009 adalah sektor Pertanian (58,70%). Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada 2009 adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih (13,71%), sementara yang terendah adalah sektor Pertanian (0,46%).

Tabel 3. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pidie Tahun 2007 – 2009 (Persen)¹⁹

Lapangan Usaha	2007	2008	2009
Pertanian	1,16	0,30	0,46
Pertambangan dan Penggalian	4,31	3,33	2,77
Industri pengolahan	3,81	4,08	5,29
Listrik, Gas, dan Air Bersih	28,27	13,87	13,71
Bangunan	6,23	6,35	5,81
Perdagangan, Hotel, dan restoran	6,84	9,62	10,15
Pengangkutan dan Komunikasi	5,92	11,00	10,80
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,01	5,98	5,30
Jasa-jasa	3,16	10,28	8,13
Produk Domestik Regional Bruto	2,73	4,52	4,27

Tabel 4. Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Tahun 2007–2009 (Persen)²⁰

¹⁸ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Budiman (Abon Budiman), Masyitah dan Muttaqin Pidie Kamis, 7 Juni 2012 serta sumber data sekunder Observasi

¹⁹ Sumber: BPS Kab. Pidie, 2010

Lapangan Usaha	2007	2008	2009
Pertanian	57,68	58,08	58,70
Pertambangan dan Penggalian	1,01	0,94	0,97
Industri pengolahan	4,09	3,78	3,55
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,33	0,33	0,33
Bangunan	5,17	6,18	6,74
Perdagangan, Hotel, dan restoran	5,74	5,53	5,15
Pengangkutan dan Komunikasi	6,42	6,49	6,58
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,31	2,19	2,12
Jasa-jasa	17,25	16,48	15,86

Sementara subsektor Peternakan dan Hasil-hasilnya adalah kontributor terbesar dari sektor pertanian (28,37%), minus 0,91% dari tahun 2008.

Tabel 5. Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Tahun 2007 – 2009.²¹

Sektor/Subsektor	2007	2008	2009
Pertanian	57,68	58,08	58,70
a. Tanaman Bahan Makanan	20,54	21,71	23,13
b. Tanaman Perkebunan	4,25	4,25	4,37
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	30,03	29,28	28,37
d. Kehutanan	0,04	0,03	0,04
e. Perikanan	2,84	2,79	2,79

A.4.4. Data Peternakan²²

- a. Banyaknya Populasi Ternak (ekor) pada 2010 adalah : 70.246 ekor sapi, 18.038 ekor kerbau, 74.463 ekor kambing, 4.707 ekor domba, 168.761 ekor ayam ras pedaging, 723.953 ekor ayam buras, dan 648.391 ekor itik.
- b. Banyaknya Produksi Telur menurut Jenis Unggas adalah : 6.682.649 butir telur ayam buras, 35.911.321 butir telur itik, dan 8.494.200 butir telur ayam ras petelur.

²⁰ Sumber: BPS Kab. Pidie, 2010

²¹ Sumber: BPS Kab. Pidie, 2010

²² Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie, 2011

A.4.5. Data Tanaman Bahan Makanan dan Perkebunan

Tabel 5.

Produksi Padi, Palawija, dan Perkebunan KAB. Pidie, 2010²³

Komoditas		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Padi Sawah	43.153	40.198	285.221	7,10
02	Padi Ladang	119	51	177	3,47
03	Kacang Tanah	146	176	478	2,72
04	Kacang Hijau	99	94	78	0,83
05	Kacang Kedelai	1.523	1.300	3.209	2,47
06	Jagung	366	4,00	1.237	309
07	Ubi Kayu	131	133	1.860	13,98
08	Ubi Jalar	26	27	347	12,85
09	Cabe Merah	320	413	2.339	5,66
10	Bawang Merah	91	86	709	8,24
11	Tomat	162	167	692	4,14
12	Kacang Panjang	183	196	864	4,41
13	Terong	70	76	311	4,09
14	Bayam	272	283	600	2,12
15	Kangkung	231	206	354	1,72
16	Mentimun	144	153	1.542	10,08
17	Melon	-	1	11	11,00
18	Semangka	202	198	2.288	11,56
19	Mangga			23.808	
20	Rambutan			13.356	

Data Kondisi Perindustrian

Tabel 6

Keadaan Industri Kecil di Kabupaten Pidie, Tahun 2010²⁴

No.	Komoditi Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai (dalam ribuan Rupiah)		
				Investasi	Produksi	Biaya
1.	Industri Pangan	2.919	6.027	8.150.280	14.354.353	9.302.589
2.	Industri Sandang	76	251	2.650.397	4.368.814	3.058.167
3.	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	706	1.860	7.406.232	38.816.813	27.666.536
4.	Industri Kerajinan	1.689	4.531	80.030.713	32.796.752	22.213.898

²³ Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie, 2011

²⁴ Sumber Primer hasil observasi dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie

5.	Industri Logam dan Elektronika	254	802	4.958.350	8.969.930	6.363.238
Jumlah		5.644	13.471	103.195.972	99.306.662	68.604.428

A.5. Struktur Sosial – ekonomi Masyarakat Lokal

Pada dasarnya struktur sosial ekonomi masyarakat di kabupaten Pidie sama dengan struktur sosial masyarakat Aceh secara umum yang diamati tidaklah memiliki perbedaan yang berarti. Beberapa pranata sosial yang sekaligus juga merupakan perangkat struktur sosial ekonomi yang ada di antaranya adalah:

A.5.1. Gampong dan Geuchik

Secara umum orang sering memahami gampong sebagai desa. Pemahaman yang demikian itu tidaklah salah namun tidak sepenuhnya tepat. Gampong merupakan sebuah kesatuan tempat tinggal sekelompok orang yang juga menjadi satuan organisasi pemerintahan terkecil dalam struktur politik di masyarakat Aceh tradisional. Sebuah gampong biasanya ditandai dengan keberadaan sebuah meunasah. Seorang pemimpin gampong dikenal dengan sebutan Geuchik. Seorang Geuchik memiliki wewenang mewakili *gampong* atas nama masyarakat gampongnya dalam berhadapan dengan kepentingan kelompok di luar gampongnya. Geuchik juga biasanya memiliki kewenangan menjadi penengah dalam sebuah perselisihan warga di luar persoalan pelaksanaan aktivitas keagamaan.

A.5.2. Meunasah/ Mesjid dan Imuem/Tengku

Meunasah merupakan sebuah kesatuan tempat tinggal sekelompok orang yang ditandai oleh adanya kesatuan tempat ibadah yang sama. Secara umum meunasah sering diartikan sebagai tempat sholat bagi sebuah masyarakat gampong. Kecuali itu, Meunasah juga merupakan sebuah pranata yang secara langsung membentuk identitas komunitas yang tidak hanya dimanfaatkan untuk shalat tapi juga aktivitas pendidikan dan sosial seperti tempat pengajian, tempat musyawarah dan pelaksanaan peringatan hari-hari besar.

Mesjid sendiri merupakan rumah ibadah yang fungsi sosialnya tidaklah semikro Meunasah. Sebuah mesjid biasanya diperuntukkan bagi beberapa gampong. Hal ini mengakibatkan jarang sekali sholat Jum'at diselenggarakan di Meunasah. Sholat Jum'at biasanya hanya dilakukan di Mesjid. Perbedaan ini pulalah yang sering dijadikan alat ukur untuk menentukan apakah sebuah rumah ibadah itu termasuk Meunasah atau Mesjid. Orang-orang yang dianggap sebagai penanggung jawab aktivitas keagamaan yang berlangsung di Meunasah atau Mesjid dikenal dengan Imeum atau Tengku. Gelar Imeum biasanya diperuntukkan bagi tokoh agama yang dikenal di beberapa gampong yang dianggap mumpuni. Sementara teungku merupakan sebutan bagi seorang tokoh agama yang mengurus dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan di tingkat Meunasah. Orang-orang yang memandang kedua gelaran tersebut adalah orang yang dianggap tokoh di masyarakat

A.5.3. Tuha Peut dan Tuha Lapan

Tuha Peut adalah sebuah pranata sosial yang juga ikut membentuk struktur sosial masyarakat Aceh sebagaimana dijumpai. Secara harfiah, Tuha Peut diartikan sebagai empat tetua, atau orang yang dihormati. Pada dasarnya Tuha Peut ini merupakan kekuasaan konsultatif yang merupakan presidium yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan cendekiawan atau pemuda. Sebagai dewan, mereka terlibat aktif dalam penyelesaian problem sosial yang ada. Fungsi utama Tuha Peut adalah bersama-sama memberikan masukan dan arahan kepada pemerintahan *gampong* untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dalam kosmologi pemikiran politik lokal, Tuha Peut ini adalah sebuah yang harus selalu seimbang kekuatannya. Keseimbangan kekuatan akan bisa menjadi terselenggaranya roda pemerintahan dan kehidupan sosial yang terkontrol. Disamping Tuha Peut, terdapat juga Tuha Lapan. Secara etimologis, Tuha Lapan berarti tetua delapan, yang merupakan anggota perluasan dari Tuha Peut. Namun keberadaan Tuha Lapan bukan merupakan dewan tetap, tetapi dewan tambahan.

A.5.4. Kemukiman

Kemukiman adalah sebuah organisasi yang menghimpun beberapa *gampong* dalam sebuah kecamatan. Pada masa lalu kemukiman hanya dianggap sebagai organisasi kultural yang mengoordinasikan beberapa *gampong* yang dianggap memiliki kedekatan dan karakter yang sama. Saat ini status kemukiman telah dilegalkan. Posisinya berada di bawah struktur kecamatan. Namun struktur kepengurusan kemukiman lebih ramping (hanya terdapat imum mukim dan tidak ada perangkat kerja operasional), karena status organisasional pemerintahan lebih bertumpu kepada kecamatan atau pedesaan. Walaupun saat ini peran kemukiman belum begitu signifikan (akibat efek dari UU Pemerintahan Desa masa Orde Baru (UU No. 5 1979), namun apresiasi kepada mukim terlihat tinggi. Di samping dianggap sebagai koordinasi lintas *gampong* yang saling berdekatan, mukim juga dianggap bagian dari proses revitalisasi struktur pemerintahan organik Aceh.

A.6. Kelompok Kepentingan

Selain struktur sosial-ekonomi dan politik yang telah disebutkan di atas, di masyarakat Bireuen yang dikaji juga ditemukan kelompok sosial lainnya yang tidak jarang menjadi kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok ini secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi dinamika kehidupan di masyarakat yang dikaji. Berdasarkan observasi, wawancara dan FGD yang dilakukan, dapat dipetakan beberapa kelompok kepentingan yang terkait dengan banyak hal termasuk rencana eksploitasi cadangan minyak dan gas yang dikaji. Kelompok-kelompok itu, diantaranya adalah: 1. Aparat Pemerintahan, 2. Aparat Keamanan, 3. Komite Peralihan Aceh (KPA / mantan anggota GAM), 4. Tokoh Masyarakat, 5. Anggota Masyarakat.

A.6.1. Aparat Pemerintahan

A.6.2. Aparat Keamanan

Aparat keamanan berkepentingan dengan pengamanan lokasi pengeboran karena sensitivitas wilayah yang digali. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, dikatakan bahwa perusahaan perlu membina hubungan baik dengan aparat keamanan ini (dengan Koramil, Kodim, Kapolsek, dan Kapolres). Terkait dengan kondisi perdamaian yang telah sangat kondusif di Provinsi Aceh, maka untuk anggaran biaya keamanan relatif jauh berkurang jika dibandingkan di masa konflik. Apabila di masa konflik terdapat begitu banyak pos militer di hampir setiap wilayah Aceh, maka setelah konflik berakhir, pos-pos militer telah direposisi.

A.6.3. Komite Peralihan Aceh (KPA)

Selain aparat keamanan, tokoh masyarakat yang diwawancarai juga menyatakan perlunya membina hubungan dengan KPA (organisasi eks. GAM). Salah seorang informan kami menyatakan perlunya melapor kepada KPA sebelum memulai kegiatan. Pembentukan KPA di tingkat kecamatan diistilahkan Sagoe, yang bertanggung jawab kepada KPA Wilayah (setingkat Kabupaten, namun struktur yang dipahami GAM sebagai teritori masa lalu).

A.6.4. Tokoh Masyarakat

Tokoh – tokoh masyarakat tradisional yang terdapat di sekitar lokasi studi di antaranya meliputi Geuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut, Tuha Lapan, Kepala Dusun, Forum Desa, Tuan Tanah, Toke Bangku, Kelompok Pemuda, Kelompok Wirid (pengajian).

Selain pembagian hasil, para tokoh masyarakat itu juga berharap agar perusahaan tidak melakukan langkah “*habis manis sepah dibuang*” seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan di masa lalu. Diharapkan agar perusahaan mampu membuat program – program pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tidak tergantung pada perusahaan. Program pemberdayaan masyarakat (community development) adalah program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi rakyat, dan bukan bantuan yang bersifat tentatif dan parsial, karena itu dianggap sebagai *cash program*. Hal itu disebabkan karena tidak adanya program pemberdayaan masyarakat. Setelah berhenti beroperasi, maka masyarakat yang sebelumnya bekerja di perusahaan tersebut menjadi pengangguran. Adapun masyarakat lainnya tetap berada dalam kemiskinan. Hal ini sangat ironis mengingat kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi.

A.6.5. Tuan Tanah/ Saudagar lokal

Bagi sebagian tuan tanah/ saudagar lokal atau sering juga dikenal dengan orang kaya, prospek eksploitasi minyak dan gas yang diamati juga memiliki arti tersendiri. Bagi mereka kehadiran perusahaan pengolahan gas atau minyak berarti membuka peluang usaha. Bagi tuan tanah upaya pengolahan sumberdaya alam berupa gas dan minyak berarti ada kemungkinan penjualan tanah guna mendukung kelancaran aktivitas. Penjualan tanah ini berarti adanya

kemungkinan keuntungan. Bagi saudagar lokal, kehadiran perusahaan yang akan mengolah gas dan minyak berarti membuka peluang usaha baru yang artinya bakal ada keuntungan. Bagi mereka, siapapun yang mengelola sumberdaya alam tidak menjadi masalah selama bisa memberi jaminan usaha dan dan keuntungan kepada masyarakat.

A.6.6. Anggota Masyarakat

Warga masyarakat yang dijumpai merasa sangat antusias dengan rencana eksplorasi di wilayah mereka. Mereka berharap akan memperoleh pekerjaan di perusahaan apabila kemudian telah beroperasi. Dengan harapan masyarakat yang begitu besar, maka perusahaan perlu memberikan penjelasan kepada mereka mengenai keterbatasan posisi yang tersedia apabila perusahaan jadi melakukan pengeboran di wilayah itu. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan program CD di daerah tersebut agar penduduk memiliki lapangan usaha sendiri yang pada akhirnya mereka tidak perlu terlalu tergantung kepada perusahaan.

Apabila perusahaan hendak melakukan perekrutan karyawan dari kalangan masyarakat, maka perusahaan perlu membuat semacam kepanitiaan kecil yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat. Panitia ini bertugas melakukan seleksi calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dengan adanya kepanitiaan ini diharapkan dapat meminimalisasi konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi apabila perusahaan melakukan perekrutan sendiri.

A.7. Masyarakat Menilai Tanah/ Lahan

Bagi masyarakat Bireuen yang dikaji, tanah merupakan sumberdaya produksi yang sangat berarti. Banyaknya anggota masyarakat yang hidupnya sangat tergantung dari pengelolaan tanah sudah menunjukkan bahwa tanah merupakan sebuah nilai yang tidak jarang juga menjadi landasan bagi pembentukan stratifikasi sosial di masyarakat. Hampir semua masyarakat mengatakan bahwa tanah adalah harta yang sangat berarti.

Berkaitan dengan upaya pengolahan sumberdaya alam (gas dan minyak) yang membutuhkan lahan sebagai sarana pendukungnya, sebagian masyarakat tidak merasa keberatan bila harus melepaskannya. Pembayaran seharusnya dilakukan dengan nilai produktif dari tanah, dan bukan dari status pemilik tanah. Jangan ada diskriminasi terhadap pembayaran tanah. Filosofi inilah kiranya yang mendorong penduduk untuk dengan mudah melepaskan tanahnya jika diperlukan untuk memperlancar proses pengolahan sumber daya alam. Bagi masyarakat harga tanah tidak akan menjadi persoalan selama pemerintah atau siapapun memberi peluang pada masyarakat untuk turut serta memperoleh keuntungan dari kegiatan pengolahan yang mempergunakan tanah mereka sebagai sarana pendukung.

Penduduk akan merasa dirugikan bila harga jual tanah dipengaruhi oleh status sosial pemilik tanah dan bukan status kesuburan atau produktivitas tanah itu. Kecuali itu sebagai besar penduduk juga berharap seandainya harus terjadi pembebasan lahan, maka penduduk harus secara langsung dilibatkan sebagai pihak yang berkepentingan dan bukan melalui pihak ketiga.

Seperti kebanyakan daerah lainnya di Aceh, yang dikaji tidak diperoleh adanya tanah yang merupakan hak ulayat. Tanah-tanah yang dianggap milik bersama yang kalau dipergunakan harus dengan ijin masyarakat biasanya adalah tanah pemakaman, tanah meunasah/mesjid/balee dan lainnya. Bila yang terkena adalah tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan tersebut pada dasarnya masyarakat tidak merasa keberatan untuk ditukar guling asal dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan tetap berprinsip pada rasa keadilan dan proporsionalitas.

B. KABAUPATEN PIDIE JAYA

B.1. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya

B.1.1. Geografis

Kabupaten Pidie Jaya adalah Kabupaten pemekaran yang sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pidie. Luas wilayah Kab. Pidie Jaya adalah 1.162,84 KM² (952 KM² darat dan 210,84 KM² lautan). Pemerintahan Kabupaten Pidie membawahi 8 Kecamatan, 34 Kemukiman, 222 Gampong, dan 600 dusun.²⁵

B.1.2. Demografi / Kependudukan

Jumlah Penduduk tahun 2010 adalah 132.956 jiwa (Laki-laki 65.004 jiwa, Perempuan 67.952 jiwa, Sex ratio 95,66%). Jumlah Penduduk tahun sebelumnya adalah 146.964 jiwa²⁶. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2009 sebesar 03,41% (dari 141.949 jiwa pada 2008), dan tahun 2010, menurun sebesar 10,54%.

Tabel 1

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha di Kabupaten Pidie Jaya, 2010²⁷

Sektor Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja			
		WNI		WNA	
		L	P	L	P

²⁵ Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya

²⁶ Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya

²⁷ Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pertanian	1	72	35	-	-
2	Pertambangan	2	15	9	-	-
3	Industri Pengolahan	33	189	1	-	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2	15	9	-	-
5	Bangunan	-	-	-	-	-
6	Perdagangan, Restoran dan Hotel	13	45	12	-	-
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-	-	-	-	-
8	Lembaga Keuangan dan Sewa Bangunan	-	-	-	-	-
9	Jasa Kemasyarakatan	15	80	33	-	-
Jumlah		66	416	99	-	-

B.2. Fasilitas Publik

B.2.1. Jalan dan Jembatan ²⁸

Total ruas jalan di Kab. Pidie Jaya pada akhir 2010 adalah sepanjang 416,6 KM, dengan rincian: 1) Jalan Negara sepanjang 37,9 KM, Jalan Provinsi memiliki total panjang 9,8 KM, jalan Kabupaten sepanjang 368,90 KM.

Panjang total Jembatan di Kab. Pidie Jaya pada akhir 2010 adalah 62M (43M berkonstruksi beton, 19M jembatan gantung permanen).

B.2.2. Potensi Perikanan, Kuala, TPI dan PPI ²⁹

e. Luas Areal Usaha Perikanan Budidaya di Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2010 : 20.947M³ Kolam, 2.086,22Ha Tambak, 64,35 Ha Waduk

f. Produksi dan Nilai Produksi perikanan laut:

Jenis komoditi		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ribu Rp)
A. Ikan Laut			
1	Sebelah	305	3.660.000
2	Lidah	19,5	253.500
3	Kakap Merah	19	627.000
4	Kurisi	120	2.040.000
5	Kuwe	177	3.894.000
6	Layang Deles	1.675	23.450.000
7	Lemadang	85	680.000
8	Teri	1.665	24.975.000
9	Kembung	460	6.900.000
10	Tenggiri	118	3.304.000

²⁸ Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya

²⁹ Sumber: Hasil observasi 2012 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya

11	Layur	170	2.720.000
12	Kakap Putih	59	1.888.000
13	Cakalang	620	10.540.000
14	Tongkol Abu-abu	880	10.560.000
15	Kerapu Bebek	10	320.000
16	Kakap Batu	50	400.000
17	Madidihang (Tuna)	1.975	43.450.000
18	Ikan Lainnya	127	1.651.000
B. Udang			
1	Udang Putih	60	2.400.000
2	Udang Windu	45	2.250.000

g. Produksi perikanan budidaya:

Jenis Komoditi		Produksi (Ton)
1	Udang Windu	270,30
2	Bandeng	437,48
3	Belanak	63,84
4	Patin	3,09
5	Gurame	1910,03
6	Lele	27,53

Daftar : Rekapitulasi Jumlah Armada Kapal Menurut GT Tahun 2011

No	Kecamatan	Ukuran Kapal			Motor Tempel	Sampan Mesin	Perahu Tanpa Motor	
		2-5 GT	7-15 GT	20-50 GT				
1	Jangka Buya	17	7	-	-	66	3	
2	Ulim	25	8	-	-	30	2	
3	Meurah Dua	19	-	6	13	40	19	
4	Meureudu	20	1	7	149	-	-	
5	Trienggadeng	57	1	-	-	61	3	
6	Pante Raja	74	45	-	-	40	1	
7	Bandar Baru	22	-	-	1	27	-	
JUMLAH		234	62	13	163	264	28	
JUMLAH TOTAL		764						

Daftar : Jumlah Alat Tangkap

Pursen 75 unit, Gill Net 110, Trammel Net 80, Pancing Rawai 244, Alat Tangkap lainnya 255
Jumlah 764

Daftar : Jumlah Produksi

- 1 Tuna, 1115 Ton
- 2 Cakalang, 1233 Ton
- 3 Teri, 1000 Ton
- 4 Tongkol, 1562 Ton
- 5 Dencis, 965 Ton

6 dll 889 Ton

Jumlah 6764 Ton

B.2.3. Rumah Sakit

Kabupaten Pidie Jaya, sampai akhir 2010 telah memiliki 1 Rumah Sakit, 10 Puskesmas, 20 Pustu, 82 Polindes, 226 Posyandu, 23 Praktek Dokter, dan 26 toko obat. Total tenaga kesehatan medis, paramedis perawat dan non-perawatan 586 orang.³⁰

B.2.4. Pendidikan ³¹

- e. Taman Kanak-Kanak (TK) TA 2010/2011
 - Jumlah Sekolah : 39 unit (3 Negeri dan 36 Swasta)
 - Jumlah Kelas : 79 unit (5 Negeri dan 74 Swasta)
 - Jumlah Pelajar: 1.741 orang (128 Negeri dan 1.613 Swasta)
 - Jumlah Guru : 237 orang (69 PNS dan 168 Non-PNS)
- f. Sekolah Dasar (SD) TA 2010/2011
 - Jumlah Sekolah : 90 unit (89 Negeri dan 1 Swasta)
 - Jumlah Kelas : 658 unit (588 Negeri dan 7 Swasta)
 - Jumlah Pelajar : 15.761 orang (15.466 Negeri, 295 Swasta)
 - Jumlah Guru : 1.873 orang (850 PNS, 1.023 Swasta)
 - Jumlah Lulusan : 1.983 orang (1.029 Laki-laki, 954 Perempuan)
- g. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) TA 2010/2011
 - Jumlah Sekolah : 23 unit (21 Negeri, 2 Swasta)
 - Jumlah Kelas : 199 unit (196 Negeri, 3 Swasta)
 - Jumlah Pelajar : 4.365 orang (4.291 Negeri, 74 Swasta)
 - Jumlah Guru : 844 orang (562 Negeri, 279 Swasta)
 - Jumlah Lulusan : 1.583 orang (794 Laki-laki, 789 Perempuan)
- h. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) TA 2010/2011
 - Jumlah SMA : 9 unit (8 Negeri, 1 Swasta)
 - Jumlah Kelas SMA: 119 unit (117 Negeri, 2 Swasta)
 - Jumlah Pelajar SMA: 4.317 orang (4.277 Negeri, 40 Swasta)
 - Jumlah Guru SMA: 450 orang (332 PNS, 118 Non-PNS)
 - Jumlah Lulusan SMA: 1.241 orang (557 Laki-laki, 684 Perempuan)
 - Jumlah SMK : 3 unit (3 Negeri, 0 Swasta)
 - Jumlah Kelas SMK: 18 unit (18 Negeri, 0 Swasta)
 - Jumlah Pelajar SMK: 289 orang (221 Negeri, 78 Swasta)
 - Jumlah Guru SMK: 98 orang (63 PNS, 35 Non-PNS)
 - Jumlah Lulusan SMK: 10 orang (6 Laki-laki, 4 Perempuan)

³⁰ Sumber : Hasil Observasi Juni 2012 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya

³¹ Sumber : Hasil Observasi Juni 2012 dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya

B.3 Kondisi Pemerintahan

Jumlah Anggota DPRK Pidie Jaya 2009-2014 sebanyak 25 orang, didominasi Partai Aceh seramai 16 orang, PAN 4 orang, 5 partai lainnya menempatkan masing-masing 1 wakilnya di legislatif Pidie Jaya. Detailnya adalah sebagaimana tabel berikut:³²

Tabel 2

Banyaknya Anggota DPRK Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Kabupaten Pidie Jaya, 2010

Partai Politik	Anggota			Persentase
	L	P	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Partai Aceh (PA)	14	2	16	64
2. Partai Amanat Nasional (PAN)	4	-	4	16
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-	1	4
4. Partai Bintang Reformasi (PBR)	1	-	1	4
5. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	1	-	1	4
6. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	1	-	1	4
7. Partai Demokrat (PD)	1	-	1	4
Jumlah	23	2	25	100

Jumlah PNS di Kab. Pidie Jaya adalah sebanyak 3.480 orang.³³

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan		Jumlah
(1)		(2)
01	SD/ Sederajat	37
02	SLTP/ Sederajat	36
03	SLTA/ Sederajat	477
04	D1	178
05	D2	401
06	D3	746
07	S1	1543

³² Sumber : Hasil Observasi Juni 2012 dan Sekretariat DPRK Pidie Jaya

³³ Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Palatihan Kabupaten Pidie Jaya

08	S2	47
09	S3	1
Jumlah Total		3.480

B.4. Perekonomian dan Ekologi Kab. Pidie Jaya

Aktifitas produksi dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan yaitu primer, sekunder dan tersier. Kegiatan primer (yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan penggalian) merupakan kegiatan terbesar yang menyusun PDRB pada kurun waktu 2007 -2010 berkisar antara 60,86 hingga 65,20 persen. Dalam kurun waktu yang sama kontribusi kegiatan sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, utilitas (listrik dan air bersih) serta konstruksi terhadap total PDRB sekitar 3,97 hingga 4,50 persen.

Sedangkan kontribusi kegiatan tersier yang terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa mencapai 30,30 hingga 35,17 persen. Hampir setiap tahunnya struktur kegiatan ini tidak berubah dimana kegiatan primer merupakan kegiatan terbesar yang menyusun PDRB Kabupaten Pidie Jaya diikuti oleh kegiatan tersier dan kegiatan sekunder.

Kegiatan primer terutama sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan penggalian menjadi andalan Pidie Jaya. Untuk wilayah Pesisir mayoritas mata pencaharian adalah nelayan, petani tambak dan melaut.

Berkaitan dengan perekonomian dan lingkungan masyarakat pesisir, masih memerlukan perhatian khusus oleh semua pihak. Padahal Pidie Jaya dan Aceh Timur merupakan tempat benih udang terbaik, untuk kebutuhan Aceh dan Malaysia. Namun potensi ini tidak terberdaya dengan baik. Apalagi tambak banyak yang terbengkalai, saluran tambak belum maksimal, sehingga budidaya udang menurun drastis karena penyakit, masyarakat banyak beralih budidaya Bandeng. Selain itu, Pidie Jaya juga banyak terdapat ikan kerapu dan kakap laut untuk kebutuhan ekspor, karena masih banyak terumbu karang. Namun disayangkan belum ada pabrik Es yang memadai, ketika musim ikan, banyak ikan mati dan busuk. Selain itu, ada pabrik pengolah biji coklat sampai dapat dikonsumsi langsung, potensi ini juga belum dimaksimalkan.³⁴

Seperti Gampong Me, Trieng Gadeng, selain ada yang bekerja juga sebagai petani sawah, petani tambak dan pekebun. Baik sebelum dan sesudah tsunami masyarakat di sini adalah nelayan dan petani. Umumnya bekerja sebagai

³⁴ Hasil FGD dan wawancara dengan Tgk. Thaleb -Panglima Sagoe KPA/PA Trieng Gadeng, Amiruddin KPA/PA dan Muhklis dari KMPA, Taufik Ismail Tokoh Masyarakat, Panglima Laot Trieng Gadeng Abu Lhok, Pidie Jaya/8 Juni 2012.

nelayan, sebagian kecil adalah petani/kebun dan tambak. Di kampung ini tidak banyak lahan pertanian yang dapat dijadikan lahan bertani masyarakat dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai petani.

Penghasilan nelayan tidak menentu, hampir senasib dengan petani, paling besar pernah didapatkan Rp. 400ribu perhari, bahkan pernah tidak dapat apa-apa karena tidak dapat ikan. Sedangkan petani walaupun dapat rezeki ketika masa panen. Kehidupan baik petani atau nelayan hampir sama nasibnya. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami harus hutang di toko dan kios-kios kecil. TPI terdekat dari gampong Meunasah Me adalah di Trieng Gadeng, sehingga TPI tersebut menjadi pilihan bagi nelayan untuk memperdagangkan hasil tangkapannya. Biasanya ikan di di Mns. Me dibeli oleh Muge Eungkot (toke/makelar ikan) karena hanya menggunakan boat (perahu) yang kecil.

Kendala utama bagi nelayan adalah cuaca seperti badai dan gelombang besar, sehingga tidak dapat masuk ke laut, selain itu susah sekali mendapat ikan karena daerah ikannya sudah sangat jauh dari pantai dan tidak mungkin berlayar terlalu jauh dengan boat kecil. Sementara, kendala terbesar bagi petani, adalah ketiadaan sarana pengairan. Dan masa bercocok tanam bagi petani padi di sini hanya sekali dalam setahun, selebihnya pada musim kering teman-teman petani beralih menanam tanaman muda seperti cabai, semangka, jagung dan sejenisnya. Masalah ekonomi dan mencari rezeki ke laut itu menurut kesanggupan masing-masing nelayan. Apalagi sejak tsunami sampai sekarang penduduk sudah bercampur dan majemuk.³⁵

Sampai saat ini perekonomian masyarakat di Tring Gadeng terutama Mns. Me sangat *terjepit*. Yang ada sedikit maju adalah penduduknya bertambah karena ada rumah bantuan tsunami yang dibangun di kampung ini.³⁶

B.4.1. Ekonomi Mikro Meureudu Pidie Jaya

Perkembangan ekonomi mikro, juga mulai terlihat dengan hadirnya sejenis kue yaitu kue *Ade* adalah sejenis penganan khas Aceh menyerupai Bingkang, dan kue ini sekarang menjadi salah satu cinderamata kuliner terkenal bagi mereka yang berkunjung ke Pidie Jaya. Di Pidie Jaya telah ada pusat jajanan Ade di daerah Meureudu, dengan berbagai pilihan merek dagang. Salah satu yang terkenal adalah Ade Kak Nah.

Hj. Hamidah, orang yang pertama sekali mengusahakan perusahaan keluarga *Ade* yang kemudian bernama *Ade Meutia* dimulai tahun 1990, usaha kue khas Aceh *Ade* untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu suami, modal pertama hanya 5 buah mangkok (belanga untuk memasak Ade). Dengan menjualnya ke

³⁵ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Alamsyah, Nelayan di Gampong Me, Trieng Gadeng, Pidie Jaya, Khamis 7 Juni 2012, serta sumber data sekunder

³⁶ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Saraini, Ibu Rumah Tangga, pedagang kios kecil, Gampong Me, Trieng Gadeng, Pidie Jaya, Khamis 7 Juni 2012.

rumah-rumah, kios, warung dan sekolah. Kuenya dijual per potong dan ada pula per buah (ukuran satu Loyang / mangkok). Selama 5 tahun Ibu Hj. Hamidah merintis usaha ini dengan sangat sabar, dari hari ke hari pembeli mulai tertarik dengan *Ade* dan peminatnya semakin hari terus bertambah.

Cara membuat Kue *Ade Meutia* ada dua macam jenis *Ade Meutia*, yaitu tepung atau ubi. Bahan-bahan lain untuk membuat *Ade* adalah santan, gula, dan bawang. Ada dua rasa yaitu rasa ubi dan rasa tepung. Kedua rasa tersebut memiliki nilai jual yang sama. Ukuran masing-masing *Ade* tersebut dibedakan menjadi ukuran besar dan kecil. Untuk *ade* yang besar nilai jualnya per buah Rp 25.000,-. Sedangkan untuk ukuran kecil Rp 15.000,-. Sejak usaha *Ade* ini berkembang, penghasilan kotor per bulan yang berhasil didapatkan mencapai 60 juta Rupiah sampai 70 juta Rupiah, dengan penghasilan bersih mencapai 12 juta Rupiah. Kue *Ade Meutia* sekarang mempekerjakan seramai 20 orang pegawai, rata-rata gaji pekerja sebesar 2 juta-2,5 juta Rupiah setiap orang per bulannya.

Terkait keterlibatan pemerintah dalam usaha yang digelutinya, tidak dalam bentuk uang tunai / modal, tetapi pemerintah pernah menyelenggarakan beberapa kali seminar dan pelatihan kewira-usahaan terkait produksi *Ade*. Bahkan pernah seminarnya untuk pengusaha *Ade* di seluruh Indonesia. Waktu itu pihak Pemerintah Pusat meminta kami untuk mengubah nama *Ade* menjadi nama Bingkang untuk menyamakan penyebutannya, tetapi mereka tidak mau, khusus dari Aceh nama *Ade* adalah ciri khas kue Bingkang dan saya menolak untuk diubah namanya ke Bingkang. Alhamdulillah selain di Aceh kue ini sudah pernah dikirim sampai ke Jakarta, bahkan pernah dibeli orang Malaysia katanya dibawa pulang ke negerinya".³⁷

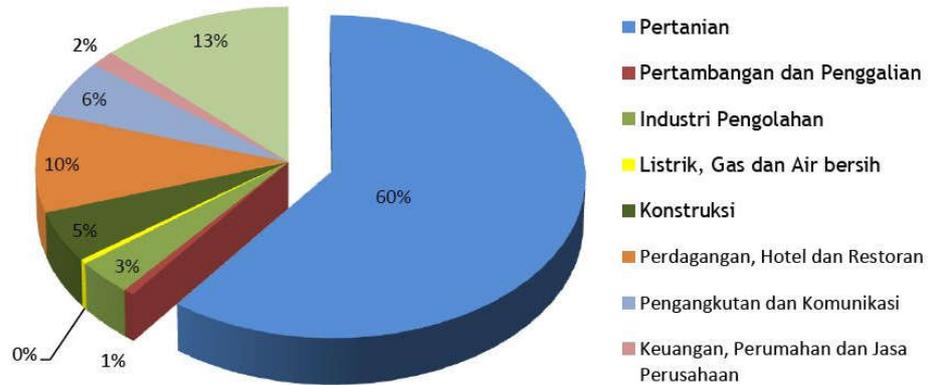
B.4.2. PDRB³⁸

Kegiatan primer paling utama yang menyokong perekonomian Kabupaten Pidie Jaya adalah sektor pertanian. Pada tahun 2010 sektor ini menyumbang 60,21 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa yang menyumbang 12,75 persen. Sektor pertanian mendapat kontribusi terbesar dari subsektor tanaman bahan makanan yang menyumbang sepertiga dari sektor pertanian, yaitu 26,31 persen. Sedangkan sektor jasa-jasa sebagian besarnya dibentuk oleh subsektor jasa pemerintahan yaitu sebesar 11,91 persen.

³⁷ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Fadli, Meutia dan Hj. Hamidah, Pengusaha kue *Ade* (Bingkang khas Aceh), Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudue, Pidie Jaya, Kamis 7 Juni 2012 serta sumber data sekunder.

³⁸ Sumber: BPS Pidie Jaya

Gambar 1
Kontribusi Sektor Ekonomi pada PDRB Pidie Jaya Tahun 2010 (%)



Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya mengalami pertumbuhan positif dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya mengalami kenaikan sebesar 5,38 persen yang merupakan pergerakan PDRB 2009 sebesar 619 milyar ke PDRB 2010 sebesar 652 milyar.

Laju pertumbuhan ekonomi yang besar terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sebesar 15,48%, sedangkan laju pertumbuhan paling kecil terjadi pada sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 0,62 %. Namun lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terbesar maupun terkecil tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju keseluruhan dari pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya karena kontribusi yang diberikan oleh sektor tersebut tidak besar sehingga yang memegang peranan pada pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya tetap sektor pertanian sebagai kontributor terbesar pada PDRB Pidie Jaya.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Pidie Jaya 2007-2010 (Persen)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	1.94	1.64	1.88	2.29
2. Pertambangan dan Penggalian	6.13	6.25	6.60	5.74
3. Industri Pengolahan	1.17	2.43	1.61	0.62
4. Listrik, Gas dan Air bersih	87.23	7.53	10.52	14.08
5. Konstruksi	18.18	16.08	14.99	11.94
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	28.56	20.22	17.71	15.48
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-0.90	10.29	10.55	8.55
8. Keuangan, Perumahan dan Jasa Perusahaan	5.81	5.20	5.68	5.11
9. Jasa-jasa	5.31	7.91	7.26	7.53
P D R B	5.06	5.26	5.32	5.38

Sektor pertanian terdiri dari subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Perubahan kelima subsektor ini sangat mempengaruhi struktur ekonomi Pidie Jaya, dikarenakan kontribusi sektor ini sangat besar. Secara umum kontribusi sektor pertanian pada tahun 2007-2010 berfluktuasi antara 60,21-64,46 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor tanaman bahan makanan. Pada tahun 2010 ini subsektor tanaman bahan makanan menyumbang 60,21 persen yang diikuti oleh subsektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 19,29 persen.

Tabel 5. Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Bagi PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 – 2010

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010
Pertanian	64.46	62.76	61.57	60.21
1. Tanaman Bahan Makanan	27.07	26.49	26.29	26.31
2. Tanaman Perkebunan	6.49	6.24	6.10	5.87
3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	21.20	20.57	20.28	19.29
4. Kehutanan	0.04	0.04	0.03	0.03
5. Perikanan	9.66	9.42	8.87	8.71
Bukan Sektor Pertanian	35.54	37.24	38.43	39.79

Tanaman Bahan Makanan dan Perkebunan

Tabel 6. Produksi Padi, Palawija, dan Perkebunan KAB. Pidie Jaya, 2010³⁹

Komoditas	Luas	Luas	Produksi	Produktivitas
-----------	------	------	----------	---------------

³⁹ Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya

		Tanam (Ha)	Panen (Ha)	(ton)	(Ton/Ha)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Padi Sawah	12 716,25	12.716,25	87.784	6,32
02	Padi Ladang	319	289	88,7	8,51
03	Kedelai	4.998,88	4.943	8.114,1	1,6
04	Jagung	477	448	681,1	1,5
05	Kacang Tanah	1.160	1.140	2.619,5	2,3
06	Kacang Hijau	400	400	429,2	1,1
07	Ubi Kayu	53,5	49,4	1.307,75	26,5
08	Cabe Merah	99	99	712,8	7,2
09	Bawang Merah	4	4	48	12
10	Tomat	25	25	300	12
11	Cabe Rawit	11	11	11	1
12	Kacang Panjang	36	36	36	1
13	Terong	9	9	54	6
14	Mentimun	10	10	20	2
15	Langsat	33	21	105	5
16	Durian	202	161	805	5
17	Mangga	157	84	420	5
18	Pepaya	16	11	55	5
19	Pisang	514	257	1.028	4
20	Rambutan	528	133	645	4,85

Data Peternakan 2010⁴⁰

- c. Banyaknya Populasi Ternak pada 2010 adalah : 31.025 ekor sapi potong, 2.491 ekor kerbau, 34.993 ekor kambing, 925 ekor domba, 194.151 ekor ayam ras pedaging, 1.090.945 ekor ayam buras, dan 131.738 ekor itik.
- d. Jumlah Pemotongan Ternak Besar dan Kecil yang tercatat di Dalam Rumah Hewan (ekor): 1) sapi potong: 2.179 sapi potong jantan, sapi potong 290 betina; 2) Kerbau: 474 jantan, 79 betina; 3) Kambing: 3.774 jantan, 1.072 betina; 4) Domba: 316 jantan, 64 betina;
- e. Jumlah Pemotongan Unggas yang Tercatat di Dalam Rumah Hewan (ekor): 1) Ayam Buras : 494.976; 2) Ayam Ras Petelur : 157.776; 3) Ayam Ras Pedaging: 255.363; 4) Itik: 73.237.
- f. Jumlah Produksi Daging Ternak Kabupaten Pidie Jaya: 228.217 ekor sapi, 64.287 ekor kerbau, 46.193 ekor kambing, 2.906 ekor domba.
- g. Banyaknya Produksi Telur menurut Jenis Unggas adalah : 597.119 butir telur ayam buras dan 96.009 butir telur itik.

Kondisi Perindustrian

⁴⁰ Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya

Tabel 7. Keadaan Industri Kecil di Kabupaten Pidie, Tahun 2010⁴¹

No	Komoditi Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai (dalam ribuan Rupiah)		
				Investasi	Produksi	Biaya
1.	Industri Pangan	2.919	6.027	8.150.280	14.354.353	9.302.589
2.	Industri Sandang	76	251	2.650.397	4.368.814	3.058.167
3.	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	706	1.860	7.406.232	38.816.813	27.666.536
4.	Industri Kerajinan	1.689	4.531	80.030.713	32.796.752	22.213.898
5.	Industri Logam dan Elektronika	254	802	4.958.350	8.969.930	6.363.238
Jumlah		5.644	13.471	103.195.972	99.306.662	68.604.428

REKAPITULASI PENGOLAHAN GARAM DI KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Bandar Baru	107
	Desa Lancang	104
	Desa Paru	3
2	Kecamatan Panteraja	3
TOTAL		110

REKAPITULASI PEDAGANG DI KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Bandar Baru	39
2	Kecamatan Tringgadeng	33
	Pasar Pangwa	12
	Pasar Tringgadeng	21
3	Kecamatan Meureudu	89
	Pasar Meureudu	55
	PPI Meureudu	34
4	Kecamatan Ulim	16
	Pasar Ulim	13
	Pasar Keude Parek	3
5	Kecamatan Jangka Buya	4
6	Kecamatan Bandar Dua	52
TOTAL		233

REKAPITULASI PENGOLAHAN TERI DI KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Panteraja	69
2	Kecamatan Jangka Buya	47

⁴¹ Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie

B.5. Struktur Sosial - Ekonomi

Relatif sama dengan Kabupaten Pidie

B.6. Kelompok Kepentingan

Relatif sama dengan Kabupaten Pidie

C. KABUPATEN BIREUN

C.1. Gambaran Umum Bireun⁴²

Aceh Bireun merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara geografis, kabupaten ini terletak di pesisir timur wilayah Aceh. Melihat posisi geografis yang demikian, maka sebagian besar kabupaten ini merupakan dataran rendah yang sebagian berupa lahan basah berawa. Pun demikian, di sebelah selatan Laut wilayah kabupaten ini akan ditemukan dataran tinggi dengan topografi tanah yang berbukit-bukit. Kondisi berbukit yang masih berupa hutan akan semakin terlihat di sekitar perbatasan Kabupaten Bener Meuriah, timur dengan Aceh Utara dan barat dengan kabupaten Pidie Jaya. Pada dasarnya pemanfaatan lahan di kabupaten ini masih didominasi oleh lahan pertanian dan perikanan.

Di daerah dataran tinggi, lahan dimanfaatkan sebagai kebun karet, sawit dan lain-lainnya. Sementara itu, di dataran yang lebih rendah, lahan dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Mendekati daerah tepian pantai batas utara yang berbatasan dengan selat Malaka, maka akan ditemukan hamparan pertambakan ikan dan udang disertai dengan beberapa kawasan hutan bakau.

Pada akhir 2010 Kabupaten Bireuen secara **Geografis** Bireun terletak 4°.54'-5°.21' Lintang Utara, lintang timur 96°.20'.97°.21' Bujur Timur. Dengan Luas wilayah 1.901,21 KM2. Sedangkan Gampong/Desa 609, Kemukiman 75 kecamatan 17 buah.

Jumlah Penduduk kabupaten Bireun 389,288 jiwa, laki-laki 191,019 jiwa, perempuan 198,269 jiwa, sex ratio 96.34%. Jumlah rumah tangga 89,946 Juta, kepadatan per KM2 204.76 jiwa, Rata-rata Penduduk per Ruta : 4 jiwa.

⁴² Sumber data primer Bireuen Dalam Angka, BPS, 2011 dan data sekunder diambil dari berbagai sumber lain (Observasi dan kajian Tim survey tanggal 7-8 Juni 2012.

Dalam segi masyarakatnya, Bireun lebih aktif dibanding masyarakat Aceh Utara atau Lhokseumawe. Awalnya Bireun adalah kewedanaan dari Aceh Utara, namun karena kepemimpinan politik yang lemah dan sering konflik, masyarakat kemudian bersikap apatis.⁴³

C.2 Fasilitas Publik

Pada dasarnya telah tersedia berbagai fasilitas publik yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun demikian, kondisi masing-masing fasilitas publik tersebut memiliki perbedaan. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa kurangnya perawatan fasilitas publik tersebut menjadi salah satu kondisi yang menyebabkan fungsi dan manfaat fasilitas tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik. Perlu diperjelas bahwa beberapa fasilitas umum yang diperhatikan oleh tim dalam kajian ini meliputi; jalan/ jembatan, Sungai/kuala/TPI/PPI/pelabuhan, pendidikan/sekolah.

C.2.1. Jalan dan Jembatan

Jalan yang ada di Bireun dapat dikelompokkan sebagai jalan milik negara/propinsi dan jalan kabupaten (lintas kecamatan). Kedua jenis jalan tersebut memiliki kondisi yang tidak sama. Tidak itu saja, beberapa ruas jalan yang termasuk sebagai jalan milik kabupaten juga memiliki kualitas yang berbeda. Ruas jalan milik negara/propinsi adalah ruas jalan yang dimanfaatkan sebagai jalan yang menghubungkan Bireun dengan kabupaten/kota lain di sekitarnya. Sebagaimana besar jalan propinsi terbuat dari aspal *hotmix*. Demikian pula di beberapa ruas jalan negara/propinsi ditemukan kerusakan berupa lubang mulai dari yang kecil sampai yang besar. Di samping itu, saat ini juga sedang dilakukan perbaikan/penambalan beberapa ruas jalan yang dibarengi dengan perbaikan beberapa gorong-gorong yang telah terancam ambruk.

Adapun jalan lintas kecamatan/milik kabupaten ada juga yang telah diaspal *hotmix* namun kualitasnya tidaklah sebaik jalan milik negara. Sebagian jalan kabupaten juga masih berupa jalan pengerasan dengan menggunakan bebatuan dan pasir dicampur sedikit aspal. Dengan kondisi yang tidak sama di tiap kecamatan, maka mobilitas penduduk di Bireun juga tidak sama tingkatannya.

Melihat sebagian besar potensi eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas terletak di kecamatan yang bukan di lintasi jalan lintas negara/propinsi, maka kondisi jalan menuju dan di sekitarnya tergolong jalan yang kondisi sama dengan jalan milik kabupaten. Pengalaman tim menuju beberapa kecamatan pesisir malah hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda dua.

⁴³ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Ir Razuardi (mantan Sekda Bireun/calon wakil bupati Bireun Pilkada) 7 Juni 2012, serta sumber data sekunder.

Sebagaimana kondisi jalan yang ada, jembatan-jembatan di Bireun kondisinya juga sama. Jembatan yang ada di lintas jalan milik negara/propinsi cenderung memiliki kualitas dan konstruksi yang baik dan sebagian besar terbuat dari beton dan baja. Sementara itu jembatan yang ada di lintasan jalan kabupaten kondisinya sebagian hanya terbuat dari besi dengan alas papan/kayu. Fasilitas jalan dan jembatan kabupaten Bireun dapat digambarkan sebagai berikut:

Fasilitas jalan (KM) negara 72,80 (Semua Asphalt), jalan provinsi 35,80 ((Semua Asphalt), jalan kabupaten 868,86 (aspal 400,40 km), kerikil 368,25 dan tanah 200,21. Sedangkan Jembatan (KM) menurut jenis; negara 778,60, jembatan provinsi 512,00, jembatan kabupaten 1.266,20.⁴⁴

C.2.2. Kesehatan masyarakat Pesisir Kab. Bireun

Kesehatan pada masyarakat pesisir di kabupaten Bireun masuk katagori baik, artinya kesadaran untuk menjaga pentingnya kesehatan baik disana. Mengenai penyakit sama seperti di daerah lainnya, memang ada katagori penyakit yang terjadi disana misalnya seperti penyakit ISPA, itu pun terjadi tergantung daya tahan tubuh mereka berkurang tetapi sejauh ini masyarakat bisa mengatasinya dengan berobat kerumah-rumah sakit terdekat. Sudah banyak program yang dilakukan DINKES untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti adanya Puskesmas untuk masyarakat berobat, kemudian adanya PUSTU. Begitu juga adanya bidan-bidan desa disana sehingga ibu-ibu hamil tidak susah lagi pergi jauh-jauh kerumah sakit untuk memeriksa kehamilan mereka. Artinya akses untuk berobat itu sudah sangat bisa dijangkau oleh masyarakat. Begitu juga dengan masalah biaya sekarang sudah gratis dengan menggunakan program pemerintah seperti JKA dan lain sebagainya. Begitu juga dengan peralatan di rumah sakit sudah cukup baik untuk dapat mengatasi permasalahan penyakit masyarakat.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat kerumah sakit itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengobatan tradisional, karena pengetahuan masyarakat sudah berkembang tidak seperti dulu. Jadi ketika mereka merasa sakit langsung pergi kerumah sakit untuk berobat. Bukannya tidak ada yang melakukan pengobatan secara tradisional tetapi persentasenya lebih sedikit dibandingkan dengan yang berobat kerumah sakit.⁴⁵

Adapun jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Pemilikan di Kabupaten Bireuen tahun 2010, ditampilkan tahun 2011, sebagai berikut⁴⁶:

Tabel I

	Pemilikan
--	-----------

⁴⁴ Hasil observasi/Pengamatan 8 Juni 2012 dan Sumber data primer Bireuen Dalam Angka, BPS, 2011

⁴⁵ Sumber data primer hasil observasi dan Wawancara dengan dr.Amir Addani, M.Kes (Kepala DINKES, Kab. Bireun) 7 Juni 2012.

⁴⁶ Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen 2010

Fasilitas kesehatan		Depkes	Pemda	ABRI	Swasta / Instansi Lainnya	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Rumah Sakit Umum	0	1	0	4	5
02	Tempat Tidur RSU	0	210	0	0	210
03	Puskesmas	0	18	0	0	18
	- Puskesmas dgn MaupunTanpa PTT	0	6	0	0	6
	- Puskesmas dengan PTT (+ Fasilitas Perawat)	0	12	0	0	12
	-Puskesmas Pembantu	0	45	0	0	45
04	Tempat Tidur Puskesmas	0	131	0	0	131
05	Rumah Bersalin	0	0	0	8	8
06	Tempat Tidur Rumah Bersalin	0	0	0	80	80
07	Pengobatan	0	0	0	3	3
08	Praktek Dokter Swasta	0	0	0	56	56
09	Praktek Bidan	0	0	0	69	69
10	Sekolah Kesehatan	0	0	0	0	0
	- AKPER	0	0	0	2	2
	- AKBID	0	0	0	1	1
	- SPK	0	0	0	1	1
11	Laboratorium Klinik	0	0	0	0	0
12	Industri Obat Tradisional	0	0	0	0	0
13	Industri Kecil Obat Tradisional	0	0	0	0	0
14	Pedangang Besar Farmasi	0	1	0	19	20
15	Apotik	0	0	0	38	38
16	Toko Obat Berizin	0	1	0	0	1
17	Gudang Farmasi	0	0	0	6	6
18	Optical	0	1	0	4	5
Jumlah		0	426	0	291	717

Tabel 2. Jumlah sarana pelayanan kesehatan menurut Kecamatan dalam kabupaten bireuen tahun 2010.⁴⁷

Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah T.Tidur Puskesmas	Jumlah Pustu	Jumlah Pusling	
				Roda Empat	Prh. Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Samalanga	1	11	3	2	0
02 Simpang. Mamplam	1	12	4	2	0
03 Pandrah	1	0	2	1	0
04 Jeunib	1	18	3	1	0
05 Peulimbang	1	0	2	1	0
06 Peudada	1	6	3	2	0
07 Juli	1	4	2	1	0
08 Jeumpa	1	0	0	1	0
09 Kota Juang	1	9	2	2	0
10 Kuala	1	0	1	1	0
11 Jangka	1	0	0	1	0
12 Peusangan	1	10	3	1	0
13 Peusangan Selatan	1	4	2	2	0

⁴⁷ ibid

14	PeusanganSb. Krueng	1	11	3	2	0
15	Makmur	1	4	3	1	0
16	Gandapura	1	8	4	2	0
17	Kuta Blang	1	21	3	2	0
Jumlah		17	117	40	24	0

Pengembangan informasi mengenai kesehatan masyarakat tersasuk lingkungan perlu diperhatikan di kabupaten Bireuen. Karena dasar sumber penyakit itu adalah dari lingkungan termasuk apa yang dikonsumsi, dalam hal ini pencemaran lingkungan seperti air minum perlu mendapat perhatian khusus, terutama masyarakat pesisir.

Dalam hal eksploitasi dan eksplorasi migas di Bireuen diharapkan para pihak memperhatikan dampak pada kerusakan lingkungan, karena hal ini mempengaruhi kesehatan masyarakat, bisa saja air yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar sudah tercemar, dan itu akan menimbulkan berbagai wabah penyakit. Oleh karena itu pemerintah dan pihak perusahaan harus sangat berhati-hati dalam melakukan pengeksplorasi migas dan pertambangan. Mesti ada perhatian dan penelitan khusus berkaitan dengan ekologi dan efek kesehatan masyarakat.

Setiap proses pengoboran dan kegiatan pertambangan, pasti ada pengaruhnya bagi kesehatan masyarakat sekitarnya, tentu hal ini setiap perusahaan akan melakukan program-program tanggungjawab sosialnya berkaitan dengan kesehatan masyarakat lingkungan.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang kesehatan masyarakat adalah pendanaan yang sangat minim. Hal ini diakui sendiri oleh “dr.Amir Addani, M.Kes sebagai Kadis Kesehatan Bireuen, karena sampai saat ini kami kewalahan dari segi pendanaan. Banyak program yang ingin dilakukan namun kembali lagi pada aspek tersebut. Jadi untuk saat ini program yang telah dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada”.

C.2.3. Pendidikan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan BPS 2010, diketahui bahwa pada tahun 2005 di seluruh Aceh Jumlah kepala menurut tingkat pendidikan; Tidak tamat Pendidikan Dasar: 14,063 jiwa, Tamat SD dan SLTP : 51,033 jiwa, Tamat SLTA : 22,958 jiwa, Tamat Akademi / PT: 5,200 jiwa Jumlah KK: 93,254 jiwa. Jumlah Pelajar TK, laki-laki 2.722, perempuan 3.413 total 6.135, Jumlah Guru TK, laki-laki 135, perempuan 502 total 637, Jumlah Gedung Sekolah : 113, Negeri: 0 dan Swasta : 113. SD dan MI, jumlah Pelajar SD dan MI : 75.763 orang, SD: 35,953, MI: 19.905, Jumlah Gedung SD dan MI : 283 unit, SD: 227 unit MI: 58 unit.

Pendidikan bagi masyarakat pesisir masih tergolong rendah, masyarakat terutama umur sekolah lebih memilih melaut untuk mendapatkan uang, sedikit yang memiliki kesadaran sekolah. Umumnya anak-anak yang sudah dewasa pergi kelaut bisa dibayangkan mereka gagal dalam pendidikan, karena lebih senang mencari uang dari pada sekolah. Ada juga yang sekolah tapi sangat sedikit, bisa dihitung jumlahnya.”⁴⁸ Artinya pendidikan bagi masyarakat pesisir terpengaruh

⁴⁸ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Panglima Laot wilayah Kuala Peudada Aiyub Aril Syah, 5 Juni 2012 dan sumber data sekunder.

dengan alam, karena anak-anak lebih suka mencari uang di laut, dari pada sekolah. 'Kalau mereka kelaut mereka langsung dapat uang. Begitu juga dengan pendidikan agama. Bukan tidak ada balai-balai pengajian, namun yang pergi mengaji masih sangat kurang. Orang tua ada yang peduli ada juga yang tidak peduli. Sehingga saya lihat kondisi pendidikan masih sangat buruk di daerah ini.

49

Hal yang sama disampaikan oleh Zulmahdi. AR, "...masyarakat dipesisir ini banyak yang senang melaut, jadi kalau sekolah lama panen kalau ke laut kan cepat panennya". Berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan non formal bagi nelayan juga belum banyak dilakukan. Kalaupun program eksplorasi dapat berjalan, tentu akan ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pendidikan masyarakat, ini bisa jadi pengetahuan tambahan jika nanti, karena rejeki dari laut itu tidak menentu, kalau dari proyek minyak dan gas ada kepastian masalah pendapatan.⁵⁰

Bagi masyarakat pesisir di Bireuen, pendidikan formal dan non formal seperti dayah, pendidikan di dayah kebanyakan pengajian biasa. Pendidikan formal rata-rata hanya tamat SMP dan SMA saja, selanjutnya bagi yang laki-laki lebih memilih kelaut. Hal tersebut di karenakan, mereka sudah terbiasa ke laut sejak kecil. Dan sudah mulai mengenal nilai uang, sehingga timbul pemahaman bagi mereka bahwa belum tentu pergi sekolah tinggi-tinggi langsung dapat kerja. Tetapi kalau kelaut hasilnya langsung dapat diperoleh. sedang bagi anak perempuan kebanyakan setelah tamat sekolah mereka memilih untuk menikah, kalo belum dapat jodoh pergi kesawah untuk bantu orang tuannya.⁵¹

Hal serupa di akui oleh Wakil Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bireun, bahwa Pendidikan di perkampungan hal yang tidak dapat dipungkiri, keberhasilan di seluruh perkampungan nelayan untuk bidang pendidikan sangat rendah. Mayoritas dari mereka lebih memilih laut sebagai masa depan.⁵²

Tingkat pendidikan yang terjadi di daerah pesisir kalau dibandingkan dengan daerah perkotaan memang sangat jauh ketinggalan mereka, karena disana masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah, ada yang bersekolah tetapi jarang sekali masuk. Itu artinya tingkat kesadaran dan kualitas pendidikan disana masih sangat kurang dan memprihatinkan. Bisa dikatakan mereka sudah senang mencari uang ketimbang bersekolah.

⁴⁹ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara Tgk. Bukhari Unsur PA, Matang Pasi, serta sumber data sekunder.

⁵⁰ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Imum Mukim Tgk. Zulmahdi. AR, 5 Juni 2012, serta sumber data sekunder.

⁵¹ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Geuchik Gampong Matgang Pasi, Bpk. Qamaruddin Usman 5 Juni 2012, serta sumber data sekunder .

⁵² Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan sekunder Ir. Hj. Rahima Kumullah (Wakil. Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bireun), 5 Juni 2012, serta sumber data sekunder.

Ada beberapa hal, satuan akses yang sudah dilakukan oleh dinas pendidikan, artinya mengenai sarana yang telah dibangun seperti pembangunan sekolah, promosi dan sosialisasi (stimulus). Selalu ada dengan bantuan kebutuhan sekolah seperti perlengkapan sekolah yaitu baju seragam dan alat-alat tulis. Namun yang disayangkan pernah dibangun sekolah SMP tepatnya di daerah Kuta Blang dan itu sudah ditutup dua tahun yang lalu lantaran tidak ada siswanya. Tetapi tahun ini rencana dari DIKNAS akan membuka kembali sekolah tersebut.

Dinas Pendidikan Bireun ada bagian PLS berfungsi untuk melakukan penyuluhan atau memancing masyarakat untuk mau sekolah, dan hal tersebut bukan hanya berlaku untuk masyarakat pesisir saja tetapi juga berlaku untuk masyarakat daerah perbukitan, karena kasus pada masyarakat pesisir dan masyarakat dataran tinggi itu sama. Banyak anak-anak disana masih putus sekolah dan ada juga yang tidak mau sekolah seperti pada masyarakat pesisir. Jadi sebenarnya untuk bagian DIKMENJUR sendiri lebih berperan untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, sedangkan untuk permasalahan yang bersifat membangun dari segi kesadaran masyarakat terhadap kemauan sekolah itu menjadi tanggungjawab PLS. Jadi antara DIKMENJUR dan PLS sama-sama mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kalau dilihat secara garis besar setiap tahun memang ada peningkatan anak-anak mau sekolah. Itu bisa dilihat nanti dari hasil APM (angka partisipasi murni). Kalau dilihat pada grafik itu menunjukkan setiap tahunnya ada peningkatannya. Misalnya kita bandingkan pada tahun 2007 dengan tahun 2012 kalau tingkatan SMP, APM tahun 2007 itu 70% anak-anak yang sekolah, sedangkan pada tahun 2012 hampir 75% anak-anak yang sekolah. Sedangkan untuk tingkatan SMA, AMP anak-anak pada tahun 2007 55% anak-anak yang sekolah, namun pada tahun 2012 meningkat menjadi 82%.

Untuk hal itu ada kerja sama dengan pihak DIKMAS yaitu pendidikan masyarakat. Dimana tidak hanya anak-anak yang putus sekolah saja tetapi kita akan tetap berupaya untuk membantu anak-anak yang kurang mampu agar tetap bersekolah. Jadi data-data tersebut akan di data oleh DIKMAS dan nanti akan dibicarakan dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal ini banyak bantuan yang akan diprogramkan pemerintah untuk dapat menunjang serta mutu pendidikan anak-anak tersebut.

Sebenarnya antara pendidikan formal dan non formal itu harus sama-sama seimbang, kalau hanya nonformal saja itu tidak baik, begitu juga sebaliknya, karna ilmu dunia itu juga harus kita ketahui begitu juga dengan ilmu agama sebagai bekal di akhirat nanti. Memang anak-anak di pesisir itu terkadang hanya ada yang mengaji saja dan tidak sekolah, dan juga yang sama sekali tidak ada

pendidikan apapun. Mungkin ini juga harus diperhatikan oleh PLS untuk dapat mensosialisasi betapa pentingnya ilmu pengetahuan.⁵³

C.3. Perekonomian dan ekologi Masyarakat Pesisir Kab. Bireuen

Terdapat 12 Kecamatan Potensial perikanan dan kelautan terutama Tambak ikan bandeng dan udang, yaitu Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Jangka, Kecamatan Peudada, Kecamatan Jeunib, Kecamatan Samalanga, Kecamatan Plimbang, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Kuala, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Kutablang, Kecamatan Gandapura.

Dengan jumlah sungai yang mengalir di kabupaten ini cukup banyak, maka jumlah muara sungai pun jumlahnya juga sama. Keberadaan sebagian besar muara sungai tersebut ternyata juga secara alami dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pelabuhan. Selama pengumpulan data dilakukan, diperoleh informasi banyak di sekitar wilayah yang diamati paling tidak terdapat 12 krueng/sungai yang oleh penduduk dikenal dengan sebutan kuala. Beberapa kuala yang juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan di antaranya adalah Kuala Peudada, Jangka, Kuala samalanga, Kuala simpang mamplam, dan Kuala peusangan, Kutablang, serta Gandapura. Kondisi masing-masing kuala tidak sama karena tingkat pemanfaatannya juga tidak sama.

Keberadaan lahan pertambakan milik rakyat juga masih terbengkalai. Konflik senjata yang berkepanjangan disertai dengan keberadaan hama udang yang susah diatasi merupakan dua alasan utama surutnya perekonomian tambak. Akumulasi permasalahan tambak terkonsentrasi pada minimnya modal dan bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan dan kendala yang muncul.

Populasi hutan bakau yang berkelompok yang saat ini bisa ditemukan di Kabupaten Bireun biasanya terletak di muara sungai. Terdapat beberapa sungai yang mengalir di kabupaten ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Banyaknya sungai yang mengalir ke laut yang kemudian menyebabkan banyaknya muara ternyata berhubungan erat dengan okupasi sebagian besar penduduk Bireun yang juga hidup sebagai nelayan. Kaitan ini muncul dikarenakan sebagian besar pedesaan di pesisir terletak di sekitar muara-muara sungai tersebut.

C.3.1. Ketergantungan Ekonomi

Potensi perikanan dan kelautan di kabupaten Bireuen cukup besar, dengan luas tambak mencapai 5.000 hektar. Luas tambak ini tidak bertambah sejak masa Belanda. Masuknya NGO beberapa waktu lalu juga tidak melakukan perluasan

⁵³ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Dinas Pendidikan Bireun / 7 Juni 2012, Muhammad Nasir (Kabid.DIKMENJUR), 2012, serta sumber data sekunder.

tambak, hanya merevitalisasi tambak yang ada. Namun menurut pengakuan Abdulsalam Jumlah anggaran dinas untuk tahun ini hanya Rp. 3 milyar, tentu saja sangat tidak memadai. Secara umum produksi tambak di Bireuen adalah dominannya adalah bandeng (70 persen). Berturut-turut kemudian adalah kerapu, nila, udang, dan lele. Sejak setelah tsunami udang tidak menjadi prioritas karena mudah terserang penyakit.⁵⁴ Seperti diungkapkan oleh Drs. H. Zulmahdi,⁵⁵ bahwa nelayan dan laut adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, dan watak masyarakat lautpun sangat keras. Namun juga mudah diatur mereka bersifat demikian karena minimnya pendidikan.

Masyarakat pesisir sangat tergantung dengan ekonomi alamiah, karena dari alamlah mereka mendapatkan rejeki. Jika alam terganggu maka pekerjaan mereka pun juga akan terganggu. Seperti yang telah saya katakan tadi, jika ada angin kencang dan membuat ombak jadi pasang maka mereka akan pergi ke ladang atau pun kesawah. Akan tetapi kalau pergi ke sawah banyak dikerjakan oleh kaum perempuan saja. Sedangkan kalau ke ladang mereka pergi bersama-sama untuk menanam tanaman kacang-kacangan⁵⁶.

Tidak dapat dipungkiri, kehidupan masyarakat pesisir sangat berpengaruh dengan alam. Seperti sekarang karena angin dan ombak besar maka masyarakat tidak melaut, hanya aktifitas darat yang lakukan. Bagi yang punya ladang, pasti keladang, kalau tidak punya ladang dengan aktifitas lain seperti menjahit jaring atau mungkin mengerjakan hal yang dapat menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Kehidupan ekonomi masyarakat nelayan tergantung pada alam tentunya.

Mereka melaut masih sangat tradisional dan tentunya alam juga berperan banyak untuk perekonomian mereka, semua masyarakat daerah pesisir juga demikian. Kecuali nelayan yang sudah menggunakan peralatan canggih, namun masyarakat di Kecamatan Peudada ini masih sangat tradisional.

Kalau masyarakat pesisir sangat tergantung dengan lingkungan, lingkungan merupakan faktor utama untuk perekonomian mereka. Alam stabil akan stabil pula perekonomian mereka, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut berlaku untuk semua daerah yang mengantungkan hidup pada alam, bukan hanya masyarakat pesisir. Masyarakat petani juga bergantung pada alam jika mereka masih hidup dengan cara tradisional.⁵⁷

⁵⁴ Sumber data primer hasil observasi dan Wawancara tgl 8 Juni 2012, dengan Abdul Salam (Kabid Sarana dan Prasarana Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireun).

⁵⁵ Sumber data primer hasil observasi dan Wawancara dengan Drs. H. Zulmahdi Imum Mukim Krueng, Kec. Peudada, Kab. Bireun), Gampong Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireun, 05 Juni 2012.

⁵⁶ Sumber data primer hasil observasi dan Wawancara dengan Bpk. Qamaruddin Usman Geusiyik Gampong Matang Pasi, kecamatan Peudada, 5 Juni 2012.

⁵⁷ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Camat Peudada Bapak Munawar, Ir. Hj. Rahima Kumullah (Wakil. Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bireun 06 Juni

C.3.2. Rumpon sebagai sumber ekonomi

Kebanyak nelayan memiliki rumpun/tu asan dan sebutan lain, rumpun rata-rata milik warga di setempat, namun ada juga milik orang tua mereka atau kakeknya. Namun pastinya semua kepemilikan adalah punya warga asli daerah ini. Untuk *rumpon* milik pribadi juga, mereka yang memiliki uang dan berstatus nelayan pasti membuat sebuah *rumpon*. Kalau ada orang yang mau mencari ikan di *rumpon* tersebut harus bayar atau memberikan jatah kepada pemiliknya. Dulu juga pernah di buat pengeboran di sini, tapi karena masalah dana atau apa tidak dilanjutkan. Kalau kena lahan ya harus gantilah begitu juga dengan *rumpon*. Saya pernah dengar juga dulu itu di bayar *rumpon* yang kena boring itu, bayar ganti rugi dan kami sendiri yang buat baru. "Laut ini kan ada di bagi 3, laut laut dalam, *teungoh* dan *baroeh*. Kalau laut dalam bayarannya mahal. Karena banyak tali atau rantai yang dibutuhkan untuk mengikat *rumpon*, kalau laut *teungoh* dan *baroeh* ya tergantung juga.⁵⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Imum Mukim Peudada, Drs. H. Zulmahdi. Ar, Jika ada eksplorasi, karena pendapatan masyarakat bisa bertambah supaya ada kemajuan. Namun harus ada pembicaraan yang jelas antara kedua pihak, apalagi masalah lahan dan *rumpon*. Hal-hal yang semacam itu kan sangat sensitive bila terganggu.

Sejak dulu masyarakat pesisir sudah melaut jadi tidak mudah untuk beralih profesi, karena *ureng glee han juet meulaot dan ureng laot han jeut meu glee*. Kalau konflik sesama masyarakat jarang ada ada, kalau ada orang luar yang curi ikan, maka akan dtangkap dan ditahan perahunya dan mesti bayar semua yang diambilnya. Masyarakat di Peudada Bireuen juga masih melakukan *khanduri* laot tiap tahun, ada potong kerbau untuk acara itu. Mereka nyaman ke laut karena yang lain pun tidak bisa kerjakan. Setahun ada timur ada barat, *na bakat na angen*. Namun itu, sudah menjadi resiko tidak ada yang mengeluh. Hanya dengan melaut kebutuhan mereka terpenuhi. Untuk masalah konflik, rasanya tidak ada yang sangat parah atau harus membahayakan. Hanya kasus pencurian ikan dan untuk penanganannya tentu *Abu Laot* yang lebih akan menanganinya.

Khusus di PPI Peudada, terdapat 250 unit boat Lampu dan boat becak atau lebih dikenak dengan sebutan "Boat Cewek", dengan 35 GT, 20GT, 15 GT, 10 GT, dan 7 GT. 45 buat Boat besar atau boat pukut. Proses pengurusan surat yang sulit bagi Boat diatas 35-20 GT pengurusannya ke Pemerintah Pusat memakan waktu 2,5tahun, memang ada surat keterangan dari Angkatan Laut. Boat besar 30 GT keatas mencapai 1 milyar Rupiah yang baru, sedangkan yang 20 GT mencapai 850-900 Juta rupiah. Untuk Boat besar diatas 30 GT, dikelola oleh 20 ABK.

2012 dan Dinas Pendidikan Bireun / 7 Juni 2012, Muhammad Nasir (Kabid.DIKMENJUR), 2012, serta sumber data sekunder

⁵⁸ Wawancara tgl 8 Juni 2012, dengan Aiyub Aril Syah (Panglima Laot wilayah Kuala Gampong Matang Pasi Peudada Kab Bireun, 5 Juni 2012, serta data sekunder.

Pimpinan 3 orang (pawang, Mekanik, Nahkoda), orang jaga/bersih 2 orang dan anggota minimal 16 orang.

Hasil tangkapan ikan berupa ikan Tongkol, buncis, jenara, tampilok, Tuna, Tengiri, Jenaha, bbaronang, kerapu, ame-ame. Paling sering dan terbanyak adalah Tongkol, amae-ame dan kembung. Pemasaran hasil tangkapan, untuk kebutuhan lokal, medan, kisaran bahkan sampai ke padang, jakarta dan bandung. Untuk kebutuhah lokal Bireun saja 50 ton Ikan berbagai jenis perhari.

Di PII peudada, disinggahi Muge (toke kecil) dengan sepeda motor dan mobil Pick Up mencapai 200 buah, Muge besar berkisar antara 100-120 buah. Terdapat 40 buruh di PPI Peudada. Toke besar lokal ada sekitar 20 orang yang berasal dari Sigli, Bireuen dan Idi Aceh Timur, toke kecil mencapai 200 orang. Tempat penyimpanan Ikan tidak berfungsi.

Berkaitan dengan Rumpon / tuasan terdapat 15-20 unit di perairan Peudada Bireuen. Kedalaman Rumpon/tuasan mulai dari 30 meter sampai 1000 meter. Harganyapun bervariasi sesuai dengan kedalaman dan jarak. Rata-rata untuk Rumpon kedalaman 1000 meter lebih harganya mencapai 40juta rupiah, sedangkan kedalaman 800 meter – 500 meter mencapai 30 juta-35 juta rupiah. Rumpon/tuasan rata-rata milik pribadi. Selain itu di kecamatan Peudada Bireuen memiliki potensi tambak udang dan bandeng, juga potensi bibit/nener udang dan bandeng secara alami.⁵⁹

C.3.3. Kenyamanan dan ekonomi

Masyarakat nelayan di Biereun khususnya Peudada tidak sepenuhnya nyaman kalau hanya mengandalkan hasil dari melaut, apalagi rejeki laut tidak menentu. Terkadang ada terkadang juga tidak ada. cuma mau tidak mau cuma pekerjaan itu yang bisa dilakukan untuk mencari rezeki, apalagi udah turun temurun masyarkat pergi melaut semua. Kalau ada pekerjaan lain yang lebih menguntungkan masyarakat pasti mau untuk beralih pekerjaan mereka.⁶⁰

Hal senada disampaikan oleh Camat Peudada, 'Alhamdulillah aman-aman saja, kalo dibilang konflik ya pasti ada, tapi insya'allah dapat diselesaikan dengan baik-baik. Kalau misalnya masyarakat pesisir sama seperti ditempat yang lain juga, mereka rata-rata pergi kelaut untuk mencari nafkah, memang watak mereka keras karna mungkin sudah terbiasa dengan kondisi alam, mungkin kalau ada pndatang merasa takut kalau ngomong sama mereka karena mereka sedikit kasar, tapi itulah "*aneuk laot*".⁶¹

⁵⁹ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara, dengan Pak Sofyan (Toke dan penjaga PPI Peudada Bireuen), 08 Juni 2012 serta sumber data sekunder.

⁶⁰ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Tgk. Bukhari (Unsur PA, Matang Pasi, Peudada Bireuen) 5 Juni 2012, serta sumber data sekunder.

⁶¹ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Bp. Munawar (Camat Peudada) Gampong Meunasah Tambon, Kec. Peudada, Kab. Bireun / 5 Juni 2012, serta sumber data sekunder.

Hingga saat ini mereka masih nyaman, karena alam masih mendukung walaupun terkadang angin dan ombak kencang. Namun dengan adanya PPI di Kuala Peudada menjadi faktor penting bagi perekonomian mereka. Untuk tingkat yang tidak kerja dapat dikatakan kecil, karena setiap orang yang tidak kerja pasti akan melaut. Jadi tidak ada yang menganggur sampai berlarut-larut. Anak-anak kecil saja sudah pandai ke laut, tapi yang disayangkan hal tersebut berefek di bidang pendidikan mereka. Mereka jadi malas ke sekolah karena sudah mengenal mata uang.

Untuk saat ini kami tidak pernah mendapat laporan mereka sudah jenuh melaut atau semacamnya, mereka selalu meminta bantuan berupa jaring dan *boat*. Dapat disimpulkan mereka masih memilih kehidupan tersebut, *the way of life*. Hanya hal tersebut yang dapat mereka lakukan, namun jika harus tahu sejauh mana kenyamanan mereka harus ada penelitian lebih lanjut kan pastinya.⁶²

Dalam hal eksplorasi migas, masyarakat merasa tidak kebaratan malah berharap menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat dan daerahnya. Tidak kebaratan sama sekali, karena dengan adanya dilakukan pengeboran migas masyarakat akan mendapat pekerjaan baru, rakyat lebih senang, apalagi generasi muda dapat merasakan perubahan dari segi matapencarian, masyarakat pesisir hampir sepenuhnya bekerja sebagai nelayan. Kondisi pun tidak menentu, kalau lagi banyak hasil tangkapan ikan banyak uangnya, tapi kalau hasil tangkapannya berkurang penghasilannya tidak ada. Belum lagi kalau cuacanya buruk, para nelayan tidak pergi melaut. Bagi mereka yang punya lahan bisalah untuk pergi kesawah atau kekebun, tapi bagi mereka yang tidak punya lahan jadi menganggur. Memang di Gampong Pasi memang banyak terkandung minyak didalamnya, bahkan pernah ada warga yang membuat sumur, air sumurnya bercampur dengan minyak. Jika *unjam* terkena, otomatis harus diganti rugi. Waktu dilakukan pengeboran minyak diganti rugi satu unjam seharga Rp.3.000.000. Dan yang sudah-sudah tidak terjadi keributan sama sekali. Kalau misalnya ada isu yang mengatakan bahwa jangka waktu pengeboran minyak dapat menghilangkan pekerjaan lokal masyarakat sebagai nelayan itu tidak mungkin. Walaupun ada hanya sebatas isu politik saja bahwa masyarakat akan terkendala dengan masa habis kerja jika minyak sudah habis. Jika perusahaan ini dibuka masyarakat setempat harus di bimbing dahulu sebelum dipekerjakan.⁶³

Bumi, air dan semua kandungan di dalamnya adalah milik Negara. Negara memiliki hak untuk mengelolanya. Jika kita menemukan sebuah atau sesuatu yang merupakan hasil dari kekayaan alam saja kita harus melaporkannya. Apalagi jika pemerintah yang menemukannya. Kembali ke pertanyaan tersebut

⁶² Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Ir. Hj. Rahima Kumullah (Wakil. Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bireun 06 Juni 2012 serta data sekunder.

⁶³ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Abdul Manaf (Geuchik Gampong Lancang), Bpk. Qamaruddin Usman (Geusyk Gampong Matang Pasi)Tgk. Bukhari (Unsur PA, Matang Pasi) dan Bp. Munawar (Camat Peudada) 6 Juni 2012 serta sumber data sekunder.

saya yakin masyarakat tidak akan menolak, jika ada beberapa tantangan atau rintangan mungkin dapat diatasi secara baik. Kami pihak dinas yang merupakan turunan dari pemerintah akan ikut membantu tentunya, namun kami juga akan membuat sebuah MoU nantinya. Untuk hal tersebut akan dibicarakan jika sudah memang akan terjadi nantinya. Berpengaruh besar tentunya, karena kehidupan mereka tergantung pada alam. Bisa saja kehidupan atau penghasilan mereka menurun dan untuk tantangan saya rasa akan aman saja jika seluruh MoU dari mereka terpenuhi. Untuk hal itu dapat dirundingkan kembali tentunya. Untuk hal kesehatan juga saya rasa perlu dibicarakan untuk urusan ini tentunya semua dinas terkait akan dilibatkan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁶⁴

Kecamatan Jeunib kabupaten Bireun, terdapat Ada 9 desa wilayah pesisir, jumlah nelayan di sekitar 2.500 orang. Tetapi karena pola masih tradisional belum berkembang, sehingga hasil tangkapan masih kurang minim, bukan berarti tidak ada potensi lautnya. Desa Peisisr Jeunib pernah ada boat bantuan tahun 2006, namun waktu serah terima boat tersebut sudah tidak layak pakai. Bantuan tersebut dari Italia. Konflik antar nelayan pernah ada namun hanya konflik biasa saja. Kalau keributan antar nelayan tidak pernah terjadi begitu besar kalau di wilayah ini. Untuk penanganannya akan dimusyawarahkan secara adat dan itu merupakan pengawasan dari panglima laot.

Proses kenduri laot masih ada, tahun kemarin masih, biaya dari pembayaran rumpon oleh pihak Zaratex. Pernah dilakukan pengeboran minyak oleh Zaratex dan ada juga beberapa rumpon yang kena semua dibayar, yang paling mahal itu rumpon *dalam* karena sangat panjang tali yang dibutuhkan untuk rumpon dalam itu. Kuala sudah tertimbun bahkan rata oleh sebab abrasi, semua tambak hancur bahkan jika satu tambak lagi hancur maka air laut akan masuk ke Kampong. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk petani tambak, padahal hasil tambak di sini sangat baik. Bagi kaum ibu-ibu dalam hal pembuatan garam dan jemur teri, hingga kini masih aktif jadi petani garam, kalau teri tergantung musimnya.⁶⁵

C.3.4. Perikanan dan Kelautan

Adapun Jumlah nelayan di Kabupaten Bireuen Tahun 2010, dapat dilihat dalam

Tabel 3 ⁶⁶

Kecamatan	Jumlah Nelayan (Orang)			
	Pekerja Tetap	Sampingan	Pemilik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

⁶⁴ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Ir. Hj. Rahima Kumullah (Wakil. Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bireun) 6 Juni 2012 serta sumber data sekunder.

⁶⁵ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan M. Abdullah (Panglima Laot Kecamatan Jeunib) dan Abdul Manaf (Geuchik Gampong Lancang) Kec. Jeunib, Kab. Bireun / 08 Juni 2012, serta sumber data sekunder.

⁶⁶ Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen

01	Samalanga	722	162	248	1,132
02	Sp. Mamplam	1,570	816	395	2,781
03	Pandrah	110	10	53	173
04	Jeunib	945	45	310	1,300
05	Peulimbang	582	56	224	862
06	Peudada	625	232	152	1,009
07	Juli	0	0	0	0
08	Jeumpa	898	750	286	1,934
09	Kota Juang	0	0	0	0
10	Kuala	432	105	150	687
11	Jangka	825	151	221	1,197
12	Peusangan	0	0	0	0
13	Peusangan Selatan	0	0	0	0
14	Peusangan Sb. Krueng	0	0	0	0
15	Makmur	0	0	0	0
16	Gandapura	310	650	155	1115
17	Kuta Blang	0	0	0	0
Jumlah		7,019	2,977	2,194	12,190

**TABEL 4. JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN LAUT MENURUT JENIS IKAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010**

Jenis Komoditas		Jumlah Produksi (Ton)	Jenis Komoditas		Jumlah Produksi (Ton)
(1)		(2)	(1)		(2)
01	Tongkol	7.804,22	22	Ikan Pedang	94.19
02	Cakalang	3.749,06	23	Julung-Julung	101.65
03	Kerapu	13,80	24	Ikan Terbang	210.5
04	Gembung	968.87	25	Ikan Lidah	82.17
05	Teri	1.030,89	26	Golok / Parang ²	142.22
06	Tuna	203,74	27	Talang / Daun Bambu	21.19
07	Tenggiri	138,69	28	Tetengkek	32.84
08	Tenggiri Papan	152,57	29	Layang	95.81
09	Gulamah / Tiga Waja	12,17	30	Kuwe	12.69
10	Layur	24,33	31	Selar	131.20
11	Cucut	24,33	32	Ikan Sebelah	16.43
12	Pari	12,17	33	Manyung	6.73
13	Kerong - kerong	13.08	34	Ikan Lainnya	456.97
14	Beronong	143.32	35	Udang Dogol	10.56
15	Seriding	31.93	36	Udang Putih / Jerbung	39.76
16	Kuro / Senangin	283.86	37	Udang Windu	19.43
17	Kerusi	74.45	38	Udang Barong	32.76
18	Biji Nangka	132.05	39	Udang Lainnya	587.63
19	Belanak	20.05	40	Rajungan	20.80
20	Lencam	10.80	41	Cumi-cumi	24.20
21	Peperak	194.04	42	Sotong	24.20

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen 2010

**TABEL 5
LUAS AREAL TAMBAK DAN JUMLAH PETANI TAMBAK
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010**

Kecamatan		Tambak	Jumlah Petani Tambah (Orang)		
			Tetap	Sambilan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Samalanga	326.50	298	0	298
02	Sp. Mamplam	640.40	586	0	586
03	Pandrah	197.50	179	0	179
04	Jeunib	232.00	212	0	212
05	Peulimbang	147.50	145	0	145
06	Peudada	275.10	261	0	261
07	Juli	0	0	0	0
08	Jeumpa	124.10	136	0	136
09	Kota Juang	0	0	0	0
10	Kuala	500.40	403	0	403
11	Jangka	1,436.50	1,720	0	1,720
12	Peusangan	410.00	803	0	803
13	Peusangan Selatan	0	0	0	0
14	Peusangan Sb. Krueng	0	0	0	0
15	Makmur	0	0	0	0
16	Gandapura	652.50	597	0	597
17	Kuta Blang	3.17	6	0	6
Jumlah		4,945.67	5,346	0	5,346

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen

TABEL 6. JUMLAH USAHA PEMBENIHAN UDANG (HATCHERY) DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Kecamatan		Jumlah Hatchery (Unit)			Tenaga Kerja (Orang)
		Besar	Sedang	Rumah Tangga	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Samalanga	0	0	0	0
02	Sp. Mamplam	0	14	0	70
03	Pandrah	0	0	0	0
04	Jeunib	0	0	0	0
05	Peulimbang	0	0	0	0
06	Peudada	0	2	0	10
07	Juli	0	0	0	0
08	Jeumpa	0	7	0	0
09	Kota Juang	0	0	0	0
10	Kuala	7	22	1	183
11	Jangka	0	2	0	10
12	Peusangan	0	0	0	0
13	Peusangan Selatan	0	0	0	0
14	Peusangan Sb. Krueng	0	0	0	0
15	Makmur	0	0	0	0
16	Gandapura	0	1	0	5
17	Kuta Blang	0	0	0	0
Jumlah		7	48	1	278

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen

TABEL 7. LUAS KOLAM, JUMLAH RODUKSI DAN JUMLAH PETANI BUDIDAYA KOLAM AIR TENANG DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Kecamatan		Teknologi Budidaya Kolam Air Tenang		
		Luas Kolam (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Jumlah Petani (Orang)
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Samalanga	2.50	3.13	125
02	Sp. Mamplam	3.00	3.75	150
03	Pandrah	2.10	2.63	105
04	Jeunib	2.50	3.13	122
05	Peulimbang	1.50	1.87	78
06	Peudada	2.90	3.63	140
07	Juli	4.80	6.00	134
08	Jeumpa	1.50	1.87	136
09	Kota Juang	2.80	3.50	73
10	Kuala	0.50	0.63	15
11	Jangka	1.70	2.13	104
12	Peusangan	2.50	3.13	85
13	Peusangan Selatan	3.00	3.75	71
14	Peusangan Sb. Krueng	2.50	3.13	69
15	Makmur	2.50	3.13	70
16	Gandapura	2.50	3.13	63
17	Kuta Blang	1.50	1.87	125
Jumlah		40.30	50.41	1,665

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen

TABEL 8. PRODUKSI TAMBAK MENURUT JENIS KOMODITI YANG BUDIDAYA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 (TON)

Kecamatan		Komoditi Yang Dibudidaya				Jumlah
		Udang	Bandeng	Nila	Lain-lain	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Samalanga	52.20	195.90	1.80	42.40	292.30
02	Sp. Mamplam	99.66	384.24	1.80	83.25	568.95
03	Pandrah	31.62	118.50	2.70	25.67	178.49
04	Jeunib	38.18	139.20	1.80	30.16	209.34
05	Peulimbang	21.66	88.50	1.80	19.17	131.13
06	Peudada	44.82	165.06	0	35.76	245.64
07	Juli	0	0	0	0	0
08	Jeumpa	19.92	74.46	4.50	16.12	115.00
09	Kota Juang	0	0	0	0	0
10	Kuala	74.70	300.46	1.80	65.00	441.96
11	Jangka	232.48	861.90	9.00	186.74	1.290.12
12	Peusangan	66.40	246.00	4.50	53.30	370.20
13	Peusangan Selatan	0	0	0	0	0
14	Peusangan Sb. Krueng	0	0	0	0	0
15	Makmur	0	0	0	0	0
16	Gandapura	99.68	391.50	2.70	84.76	578.64
17	Kuta Blang	0	1.88	0.90	0.13	0
Jumlah		781.32	2.967.60	33.30	642.46	4.421.77

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen

C.3.5. Perindustrian

Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal Dan Non Formal : 2.902 unit

Jumlah Pelanggan Air Minum Pdam Tirta Krueng Peusangan : 10.448

Rumah Tangga: 9,263, Niaga: 725, Sosial: 195, Instansi Pemerintah: 205 dan Niaga Besar 60 buah⁶⁷.

TABEL 9. JENIS DAN LOKASI SUMBER DAYA BAHAN GALIAN INDUSTRI PER KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Kecamatan	Jenis Bahan Galian	Cadangan (Ton)	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
01	Samalanga	Batu andesit	6.060.780	Sudah Tergarap
		Pasir dan batu	1.980.000	sda
		Pasir sungai	6.149.089	sda
		Batu kali	65.340.000	sda
		Batu apung	19.800.000	sda
		Batu gunung	9.900.000	sda
02	Sp. Mamplam	Pasir dan batu	9.125.762	sda
		Kerikil	5.070.207	sda
		Batu kapur	97.020.000	sda
		Batu gunung	22.770.000	sda
		Tanah liat	19.800.000	sda
03	Pandrah	Lempung	900.000	sda
		Batu gunung	7.000.000	sda
04	Jeunib	-	-	-
05	Peulimbang	-	-	-
06	Peudada	Pasir dan batu	3.920.000	Sudah Tergarap
		Pasir sungai	8.745.520	sda
		Kerikil	25.723.040	sda
		Lempung	3.822.000	sda
07	Juli	Batu andesit	9.154.051	sda
		Pasir dan batu	25.249.833	sda
		Pasir sungai	21.935.745	sda
		Kerikil	10.171.396	sda
		Batu kali	66.300.000	sda
		Batu koral	88.725.000	sda
		Tanah liat	38.025.000	sda
08	Jeumpa	Pasir dan Batu	3.960.000	sda
09	Kota Juang	-	-	-
10	Kuala	-	-	-
11	Jangka	Lempung	600.000	Sudah Tergarap
12	Peusangan	Pasir dan batu	36.254.562	sda
		Pasir sungai	81.388.890	sda
		Tanah liat	175.230.000	sda
		Batu apung	19.800.000	sda
		Lempung	1.188.000	sda
13	Peusangan Selatan	-	-	-
14	Peusangan Sb.	Batu andesit	8.541.920	Sudah Tergarap

⁶⁷ Sumber : PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen

	Krueng			
		Pasir dan batu	13.141.990	sda
		Pasir sungai	9.279.883	sda
		Kerikil	6.198.605	sda
		Batu kali	95.545.000	sda
15	Makmur	-	-	-
16	Gandapura	Lempung	1.492.500	Sudah Tergarap
		Pasir Besi	9.950.000	sda
17	Kuta Blang	Pasir dan batu	21.722.916	sda
		Pasir sungai	25.113.578	sda

Sumber: Dinas Pengairan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bireuen

TABEL 10
LUAS LAHAN SAWAH DAN BUKAN SAWAH MENURUT KECAMATAN DALAM
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Kecamatan		Luas Kecamatan (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Bukan Lahan Sawah (Ha)
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Samalanga	15,622	1,616	14,006
02	Sp. Mamplam	21,849	1,792	20,057
03	Pandrah	8,933	973	7,960
04	Jeunib	11,452	1,408	10,044
05	Peulimbang	6,415	1,003	5,412
06	Peudada	39,133	2,118	37,015
07	Juli	21,208	860	20,348
08	Jeumpa	6,942	1,403	5,539
09	Kota Juang	3,156	658	2,498
10	Kuala	2,372	1,064	1,308
11	Jangka	8,118	1,437	6,681
12	Peusangan	12,248	2,289	9,959
13	Peusangan Selatan	10,633	793	9,840
14	Peusangan Sb. Krueng	7,662	1,453	6,209
15	Makmur	6,653	1,291	5,362
16	Gandapura	3,615	1,290	2,325
17	Kuta Blang	4,110	1,336	2,774
Jumlah		190.121	22,784	167,337

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Kabupaten Bireuen

TABEL 11. LUAS DAN PENGGUNAAN LAHAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Jenis Penggunaan Lahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
(1)		(2)	(3)
01	Sawah	22,784	11.98
02	Perkebunan Besar	24,659	12.97
03	Perkebunan Rakyat	0	0.00
04	Ladang	32,137	16.90
05	Padang Rumput	4,962	2.61

55

06	Hutan Rakyat	14,418	7.58
07	Hutan Negara	36,275	19.08
08	Rawa-Rawa	1,139	0.60
09	Tambak	4,556	2.40
10	Kolam/Tebat/Empang	39	0.02
11	Lain-lain	49,152	25.85
Jumlah		190.121	100.00

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bireuen - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen

TABEL 12. JUMLAH ZAKAT YANG DIKOORDINIR OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMAPER KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Kecamatan		Nilai (Rp)
(1)		(2)
01	Samalanga	17,000,000
02	Sp. Mamplam	8,000,000
03	Pandrah	4,000,000
04	Jeunib	13,000,000
05	Peulimbang	4,000,000
06	Peudada	19,000,000
07	Juli	7,000,000
08	Jeumpa	5,700,000
09	Kota Juang	14,000,000
10	Kuala	6,000,000
11	Jangka	26,000,000
12	Peusangan	39,000,000
13	Peusangan Selatan	14,000,000
14	Peusangan Sb. Krueng	8,220,000
15	Makmur	5,000,000
16	Gandapura	23,000,000
17	Kuta Blang	26,000,000
Jumlah		238,920,000

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen

C.3.6. Pertanian dan Perkebunan

Luas Lahan Pertanian : 22,784 Ha

TABEL 13. PERKEMBANGAN PRODUKSI SAYUR-SAYURAN DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Komoditas	Tahun ini (pohon / rumpun)	Yang menghasilkan (phn/rumpun)	Produktivitas (Kw/Pohon atau Rumpun)	Produksi (Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01	Bawang Merah	30	31	78.06	242
02	Petsai/ Sawi	63	63	110.00	693
03	Kacang Panjang	433	425	50.00	2,125
04	Cabe Besar	271	270	55.00	1,485
05	Cabe Rawit	39	45	64.00	288
06	Tomat	57	65	110.00	715
07	Terong	103	92	106.96	984

08	Ketimun	382	379	139.00	5,268
09	Kangkung	254	240	123.00	2,952
10	Bayam	287	280	22.00	616
11	Semangka	103	97	224.95	2,182
12	Jamur	2,264	2,520	40.79	10,280

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bireuen

TABEL 14. LUAS BAKU SAWAH YANG DIAIRI DENGAN SISTEM IRIGASI MENURUT KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Kecamatan	Jenis Irigasi (Ha)					Luas Baku Sawah
	Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Non PU	Tadah Hujan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Samalanga	31	1,566	7	0	12	1,616
02 Sp. Mamplam	522	592	151	0	527	1,792
03 Pandrah	626	101	21	4	221	973
04 Jeunib	0	883	156	315	54	1,408
05 Peulimbang	0	735	108	0	160	1,003
06 Peudada	0	873	120	0	1,125	2,118
07 Juli	208	20	0	0	632	860
08 Jeumpa	14	1,317	0	31	41	1,403
09 Kota Juang	27	218	340	0	73	658
10 Kuala	0	826	238	0	0	1,064
11 Jangka	0	744	614	55	24	1,437
12 Peusangan	988	724	34	60	483	2,289
13 Peusangan Selatan	0	0	70	0	723	793
14 Peusangan Sb. Krueng	0	0	0	0	1,453	1,453
15 Makmur	0	0	208	175	908	1,291
16 Gandapura	0	0	0	152	1,138	1,290
17 Kuta Blang	505	129	48	70	584	1,336
Jumlah	2,921	8,728	2,115	862	8,158	22,784

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Kabupaten Bireuen

TABEL 15. PRODUKSI PADI, PALAWIJA, KAB. BIREIUEEN, 2010

Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Padi	37,918	43,083	44.35	175,976
02 Kedelai	23,179	21,264	15.88	33,758
03 Jagung	2,735	1,374	405.31	3,528
04 Kacang Tanah	223	198	16.52	327
05 Kacang Hijau	229	224	18.13	406
06 Ubi Kayu	411	348	170.11	5,920
07 Ubi Jalar	111	102	97.94	999

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bireuen

TABEL 16. PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT TANAMAN PALA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Komoditas		Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kunyit	0	0	0
02	Pala	88	141	2,767
03	Sagu	137	68	3,934
04	Karet	2,090	753	7,583
05	Kelapa Sawit	1,731	7,607	85,115
06	Nilam	36	4	140
07	Kopi	6	7	2,333
08	Kapuk Randu	222	175	3,025
09	Pinang	7.702	8.844	20,754
10	Kakao	4,607	3,801	17,607
11	Lada	0	0	0
12	Kemiri	256	132	4,019
13	Jambu Mete	0	0	0
14	Tebu	0	0	0
15	Cengkeh	5	2	400
16	Aren	7	4	800
17	Jahe	0	0	0
18	Kelapa	13,620	12,835.50	17,927
19	Jarak	13	0	0

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen

TABEL 17. JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENGUSAHAKAN JENIS TANAMAN DAN SUMBER PENGHASILAN UTAMA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Yang Mengusahakan Tanaman					Sumber Penghasilan Utama Penduduk*	Keterangan
	Padi Sawah	Padi Ladang	Palawija	Hortikultura	Perkebunan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Samalanga	3,521		207	134	696	1, 4, 5	*Catatan : 1. Pertanian Tanaman Pangan 2. Pertanian Tanaman Perkebunan 3. Perternakan 4. Perikanan 5. Perdagangan 6. Industri Pengolahan 7. Jasa 8. Lainnya
02 Sp. Mamplam	3,404		37	18	1,701	1, 2, 4	
03 Pandrah	1,196		119	143	295	1, 4	
04 Jeunib	3,194		201	9	1,552	1, 2, 4, 5, 8	
05 Peulimbang	1,156		146	131	2,865	1, 2, 4, 5	
06 Peudada	2,701		556	145	2,007	1, 2, 4	
07 Juli	1,902		708	504	5,014	1, 2, 3, 6, 8	
08 Jeumpa	3,871		752	538	2,775	1, 2, 4, 7	
09 Kota Juang	1,366		176	23	536	1, 2, 5, 7, 8	
10 Kuala	2,496		0	19	215	1, 4	
11 Jangka	2,888		43	124	8,018	1, 2, 4, 6	
12 Peusangan	4,900		270	167	1,316	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
13 Peusangan	834		870	719	8,704	1, 2	

	Selatan						
14	Peusangan Sb. Krueng	1,162		681	585	3,395	1
15	Makmur	3,416		178	104	3,549	1, 2, 8
16	Gandapura	2,387		214	173	1,782	1, 2
17	Kuta Blang	2,813		34	41	828	1, 4
Jumlah		43,207	0	5,192	3,577	45,248	

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen

C.3.7. PETERNAKAN

TABEL 18. JUMLAH PARA PETERNAK YANG TERSEBAR DI BEBERAPA KECAMATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Kecamatan		Jumlah Peternak Berdasarkan Jenis Ternak							
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Ras	Ayam Pedaging	Itik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
01	Samalanga	1,673	239	273	128	1,917	0	1	1,117
02	Sp. Mamplam	1,259	372	271	160	1,241	3	0	1,164
03	Pandrah	789	620	281	225	891	0	0	318
04	Jeunib	1,120	374	373	186	2,336	0	1	519
05	Peulimbang	876	185	151	84	539	0	0	178
06	Peudada	1,101	441	308	187	1,067	2	1	383
07	Juli	1,264	214	246	115	1,047	0	2	185
08	Jeumpa	1,412	166	315	96	2,634	2	3	822
09	Kota Juang	1,602	205	451	93	579	4	7	339
10	Kuala	600	133	219	50	5,560	0	0	325
11	Jangka	1,258	314	224	76	2,421	25	2	671
12	Peusangan	1,757	168	385	79	1,084	3	3	356
13	Peusangan Selatan	476	302	259	80	467	0	4	172
14	Peusangan Sb. Krueng	463	207	223	107	107	3	2	138
15	Makmur	561	227	262	122	1,166	2	0	392
16	Gandapura	1,452	255	341	119	1,218	21	19	422
17	Kuta Blang	973	154	225	75	2,469	3	2	567
Jumlah		18,636	4,576	4,807	1,982	26,743	68	47	8,068

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen

TABEL 19. POPULASI TERNAK BESAR (SAPI DAN KERBAU) DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

Kecamatan		Sapi			Kerbau		
		Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
01	Samalanga	2,163	2,233	4,396	131	127	258
02	Sp. Mamplam	1,358	1,211	2,569	199	206	405
03	Pandrah	2,306	2,077	4,383	651	589	1,240
04	Jeunib	3,198	3,134	6,332	464	373	837
05	Peulimbang	2,001	2,197	4,198	197	133	330
06	Peudada	4,080	3,461	7,541	298	233	531
07	Juli	3,809	2,852	6,661	184	177	361
08	Jeumpa	2,550	2,004	4,554	195	138	333

09	Kota Juang	1,335	2,286	3,621	179	231	410
10	Kuala	1,813	1,393	3,206	108	158	266
11	Jangka	2,101	2,125	4,226	293	335	628
12	Peusangan	3,036	2,192	5,228	196	140	336
13	Peusangan Selatan	3,327	2,418	5,745	279	326	605
14	Peusangan Sb. Krueng	3,016	1,562	4,578	217	197	414
15	Makmur	1,983	2,484	4,467	379	175	554
16	Gandapura	2,796	3,020	5,816	251	259	510
17	Kuta Blang	2,261	2,567	4,828	159	163	322
Jumlah		43,133	39,216	82,349	4,380	3,960	8,340

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen

**TABEL 20. POPULASI TERNAK KECIL (KAMBING DAN DOMBA)
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010**

Kecamatan	Kambing			Domba			
	Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
01	Samalanga	2,237	2,162	4,399	81	121	202
02	Sp. Mamplam	3,896	2,535	6,431	636	341	977
03	Pandrah	2,111	2,476	4,587	286	280	566
04	Jeunib	3,246	3,331	6,577	1,140	1,265	2,405
05	Peulimbang	2,324	1,341	3,665	341	221	562
06	Peudada	2,788	2,860	5,648	711	632	1,343
07	Juli	462	1,962	2,424	91	93	184
08	Jeumpa	1,748	1,222	2,970	571	442	1,013
09	Kota Juang	878	1,886	2,764	372	230	602
10	Kuala	1,607	617	2,224	251	221	472
11	Jangka	1,911	1,422	3,333	920	356	1,276
12	Peusangan	3,135	2,251	5,386	864	977	1,841
13	Peusangan Selatan	1,350	1,028	2,378	563	534	1,097
14	Peusangan Sb. Krueng	1,367	2,046	3,413	389	379	768
15	Makmur	1,058	1,318	2,376	1,119	1,071	2,190
16	Gandapura	2,340	3,475	5,815	1,596	2,198	3,794
17	Kuta Blang	1,562	1,641	3,203	381	441	822
Jumlah		34,020	33,573	67,593	10,312	9,802	20,114

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen

**TABEL 21. POPULASI TERNAK UNGGAS MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010**

Kecamatan	Jenis Unggas				
	Ayam Buras	Ayam Ras	Ayam Pedaging	Itik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01	Samalanga	95,855	0	5,000	55,858
02	Sp. Mamplam	49,661	1,925	0	58,217
03	Pandrah	26,763	0	0	15,917
04	Jeunib	70,067	0	2,781	25,997
05	Peulimbang	21,573	0	0	8,900
06	Peudada	32,024	2,050	3,790	19,163
07	Juli	31,418	0	4,505	9,266
08	Jeumpa	79,019	2,858	6,466	41,269

09	Kota Juang	17,360	14,455	29,278	16,978
10	Kuala	17,996	0	0	16,271
11	Jangka	72,642	38,993	1,838	33,573
12	Peusangan	32,516	4,354	4,059	17,835
13	Peusangan Selatan	14,020	0	4,143	8,648
14	Peusangan Sb. Krueng	3,233	4,204	1,838	6,897
15	Makmur	35,002	1,307	0	19,624
16	Gandapura	48,723	3,563	22,736	21,130
17	Kuta Blang	74,087	1,466	3,147	28,304
	Jumlah	721,959	75,175	89,581	403,847

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen

C.4. Ketenaga-kerjaan kabupaten bireuen

Menurut data BPS tahun 2008, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka 9,42 juta orang (8,48%) dari total angkatan kerja (111,4 juta orang). 7,4 juta diantaranya berada pada usia produktif. Banyak faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran tersebut, diantaranya: Jumlah pencari kerja dan jumlah kesempatan kerja tidak seimbang, terdapatnya kesenjangan yang kentara antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja, angka putus sekolah (pendidikan) yang tidak memiliki keterampilan (unskilled labor), sehingga tidak terserap dalam lapangan kerja, pengangguran baru karena kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis ekonomi global dan tidak adanya upaya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara maksimal. Faktor-faktor tersebut adalah penyebab umum terhadap kondisi tenaga kerja di Indonesia.

Dalam konteks lokal Aceh, faktor-faktor khusus untuk kondisi tersebut bisa disebutkan diantaranya: Konflik selama lebih dari 3 (Tiga) dekade yang disikapi secara represif oleh pemerintah-pemerintah pusat sebelumnya dan bencana alam Tsunami, merusak dan menghilangkan sumber-sumber kehidupan termasuk ekonomi masyarakat. Aceh memiliki sumber daya alam melimpah yang menunggu untuk dikelola dan dimanfaatkan secara profesional dan maksimal. Kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut secara profesional dan maksimal harus dikondisikan dan didukung oleh berbagai pihak, demi terciptanya ketahanan ekonomi masyarakat.

Sinergisitas antara pemerintah, swasta (pasar), lembaga-lembaga/organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat harus diwujudkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kelompok-kelompok yang harus bersinergi tersebut berperan untuk melakukan berbagai tindakan konstruktif dan produktif sesuai kapasitasnya masing-masing. Masyarakat sebagai pusat dari objek pembangunan (centre of development) harus dikelola/ditata kembali kapasitas, mentalitas, intelektualitas, dan inklusivitasnya dalam pembangunan. Kemampuan masyarakat untuk tersertakan dalam proses pembangunan sudah merupakan sesuatu yang urgen (genting) untuk diwujudkan. Berbagai kondisi

sosial yang kontra produktif harus didata, dicermati dan dicarikan solusi agar tindakan yang terarah dan efektif bagi pembangunan ekonomi masyarakat dapat terwujud.

Masa konflik selama 30 tahun lebih yang telah berakhir pada akhir tahun 2005 yaitu dengan ditandatangani perjanjian damai (MOU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan juga setelah bencana gempa dan tsunami akhir tahun 2004 berbagai masalah dan tantangan masih banyak tersisa dan perlu ditangani dengan segera. Kehilangan harta dan jiwa, rusaknya infrastruktur, hancurnya perekonomian masyarakat, kehilangan matapencaharian, tingkat pengangguran, trauma, rusaknya pelayanan umum, dan terguncangnya tatanan sosial adalah sebagian dari masalah dan tantangan yang harus dihadapi.

Hal tersebut berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah hanya mencapai 2-4% per tahun, hal tersebut terus berlangsung sampai saat ini. Masyarakat dari berbagai kalangan termasuk internasional bekerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan lokal telah mengerahkan berbagai upaya untuk membantu pemulihan pasca tsunami dan konflik Aceh. Permasalahan ekonomi masyarakat Aceh juga dapat dilihat dari segi kegiatan ekonomi rakyat di luar minyak dan gas yang masih konvensional dalam skala kecil teknologi yang rendah, serta berbasis pada komoditas dengan linkages, sedangkan kegiatan agro-industri belum berkembang dengan baik yang berbanding terbalik dengan potensi ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat potensial namun belum digarap dengan baik karena lemahnya infrastruktur pendukung ekonomi termasuk permodalan yang belum memadai dengan tingkat integrasi regional belum optimal dan proses nilai tambah terjadi di luar Aceh

Jumlah pencari kerja terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin Tahun 2010⁶⁸, tidak ada atau terdaftar pendidikan tingkat SD/ sederajat/ tidak tamat yang mencari kerja. Sedang tingkat SLTP/ sederajat laki-laki 25 orang, perempuan 5 orang total 30 orang. SLTA/ sederajat laki-laki 514, perempuan 139 total 653 orang. DI-DIII laki-laki 129, perempuan 332 orang total 461. Sedangkan tingkat sarjana laki-laki 244, perempuan 283, total 461 orang. Pascasarjana laki-laki 1 orang, perempuan 4 orang total 5 orang. Total pencari kerja yang terdaftar adalah 1.676 orang.

Jumlah penempatan tenaga kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin, SLTP/ Sederajat laki-laki dan perempuan 5 orang, SLTA/ Sederajat 142 orang. DI-DIII 134, Sarjana 207 dan pasca sarjana 1 orang. Dan Jumlah pencari kerja terdaftar pada dinas sosial dan Tenaga kerja laki-laki

⁶⁸ Sumber data primer dari Dinas sosial dan Tenaga Kerja Bireuen Bireun 2011 dan data sekunder diambil dari berbagai sumber.

dan perempuan 2010, Sisa Akhir Tahun 2009 berjumlah 1,803, Pendaftaran Tahun 2010 berjumlah 1,676, Penempatan Tahun 2010 adalah 489 orang. Penghapusan adalah 470 orang, Belum ditempatkan Akhir Tahun 2010 berjumlah 2,520.

Jumlah perusahaan dan tenaga kerja menurut sektor usaha di Kabupaten Bireuen tahun 2010: Pertanian 2 perusahaan terserap 232 orang, Pertambangan dan Penggalian 6 perusahaan 90 orang, Industri Pengolahan 10 buah 116 orang, Listrik, Gas dan Air Minum 2 buah terserap 138. Bangunan/Konstruksi 134 buah 918 orang. Perdagangan, Hotel dan Restoran 149 buah terserap 1,008 orang. Pengangkutan dan Komunikasi 10 buah 42 orang. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 78 buah terserap 1,000 orang. Jasa-jasa 9 buah 41 orang. Total perusahaan 400 buah terserap tenagakerja 3,607 orang.

C.5. Struktur Sosial Masyarakat Lokal

Pada dasarnya struktur sosial masyarakat di kabupaten Bireun sama dengan struktur sosial masyarakat Aceh secara umum yang diamati tidaklah memiliki perbedaan yang berarti. Beberapa pranata sosial yang sekaligus juga merupakan perangkat struktur sosial ekonomi yang ada di antaranya adalah:

C.5.1. Gampong dan Geuchik

Secara umum orang sering memahami gampong sebagai desa. Pemahaman yang demikian itu tidaklah salah namun tidak sepenuhnya tepat. Gampong merupakan sebuah kesatuan tempat tinggal sekelompok orang yang juga menjadi satuan organisasi pemerintahan terkecil dalam struktur politik di masyarakat Aceh tradisional. Sebuah gampong biasanya ditandai dengan keberadaan sebuah meunasah. Seorang pemimpin gampong dikenal dengan sebutan Geuchik. Seorang Geuchik memiliki wewenang mewakili *gampong* atas nama masyarakat gampongnya dalam berhadapan dengan kepentingan kelompok di luar gampongnya. Geuchik juga biasanya memiliki kewenangan menjadi penengah dalam sebuah perselisihan warga di luar persoalan pelaksanaan aktivitas keagamaan.

C.5.2. Meunasah/ Masjid dan Imuem/Tengku

Meunasah merupakan sebuah kesatuan tempat tinggal sekelompok orang yang ditandai oleh adanya kesatuan tempat ibadah yang sama. Secara umum meunasah sering diartikan sebagai tempat shalat bagi sebuah masyarakat gampong. Kecuali itu, Meunasah juga merupakan sebuah pranata yang secara langsung membentuk identitas komunitas yang tidak hanya dimanfaatkan untuk shalat tapi juga aktivitas pendidikan dan sosial seperti tempat pengajian, tempat musyawarah dan pelaksanaan peringatan hari-hari besar.

Mesjid sendiri merupakan rumah ibadah yang fungsi sosialnya tidaklah semikro Meunasah. Sebuah mesjid biasanya diperuntukkan bagi beberapa gampong. Hal

ini mengakibatkan jarang sekali sholat Jum'at diselenggarakan di Meunasah. Sholat Jum'at biasanya hanya dilakukan di Mesjid. Perbedaan ini pulalah yang sering dijadikan alat ukur untuk menentukan apakah sebuah rumah ibadah itu termasuk Meunasah atau Mesjid. Orang-orang yang dianggap sebagai penanggung jawab aktivitas keagamaan yang berlangsung di Meunasah atau Mesjid dikenal dengan Imeum atau Tengku. Gelar Imeum biasanya diperuntukkan bagi tokoh agama yang dikenal di beberapa gampong yang dianggap mumpuni. Sementara teungku merupakan sebutan bagi seorang tokoh agama yang mengurus dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan di tingkat Meunasah. Orang-orang yang menyandang kedua gelaran tersebut adalah orang yang dianggap tokoh di masyarakat

C.5.3. Tuha Peut dan Tuha Lapan

Tuha Peut adalah sebuah pranata sosial yang juga ikut membentuk struktur sosial masyarakat Aceh sebagaimana dijumpai di kecamatan Bireun. Secara harfiah, Tuha Peut diartikan sebagai empat tetua, atau orang yang dihormati. Pada dasarnya Tuha Peut ini merupakan kekuasaan konsultatif yang merupakan presidium yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan cendekiawan atau pemuda. Sebagai dewan, mereka terlibat aktif dalam penyelesaian problem sosial yang ada. Fungsi utama Tuha Peut adalah bersama-sama memberikan masukan dan arahan kepada pemerintahan *gampong* untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dalam kosmologi pemikiran politik lokal, Tuha Peut ini adalah sebuah yang harus selalu seimbang kekuatannya. Keseimbangan kekuatan akan bisa menjadi terselenggaranya roda pemerintahan dan kehidupan sosial yang terkontrol. Disamping Tuha Peut, terdapat juga Tuha Lapan. Secara etimologis, Tuha Lapan berarti tetua delapan, yang merupakan anggota perluasan dari Tuha Peut. Namun keberadaan Tuha Lapan bukan merupakan dewan tetap, tetapi dewan tambahan.

C.5.4. Kemukiman

Kemukiman adalah sebuah organisasi yang menghimpun beberapa *gampong* dalam sebuah kecamatan. Pada masa lalu kemukiman hanya dianggap sebagai organisasi kultural yang mengoordinasikan beberapa *gampong* yang dianggap memiliki kedekatan dan karakter yang sama. Saat ini status kemukiman telah dilegalkan. Posisinya berada di bawah struktur kecamatan. Namun struktur kepengurusan kemukiman lebih ramping (hanya terdapat imum mukim dan tidak ada perangkat kerja operasional), karena status organisasional pemerintahan lebih bertumpu kepada kecamatan atau pedesaan. Walaupun saat ini peran kemukiman belum begitu signifikan (akibat efek dari UU Pemerintahan Desa masa Orde Baru (UU No. 5 1979), namun apresiasi kepada mukim terlihat tinggi. Di samping dianggap sebagai koordinasi lintas gampong yang saling berdekatan, mukim juga dianggap bagian dari proses revitalisasi struktur pemerintahan organik Aceh.

C.6. Kelompok Kepentingan

Selain struktur sosial-ekonomi dan politik yang telah disebutkan di atas, di masyarakat Bireuen yang dikaji juga ditemukan kelompok sosial lainnya yang tidak jarang menjadi kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok ini secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi dinamika kehidupan di masyarakat yang dikaji. Berdasarkan observasi, wawancara dan FGD yang dilakukan, dapat dipetakan beberapa kelompok kepentingan yang terkait dengan banyak hal termasuk rencana eksploitasi cadangan minyak dan gas yang dikaji. Kelompok-kelompok itu, diantaranya adalah: 1. Aparat Pemerintahan, 2. Aparat Keamanan, 3. Komite Peralihan Aceh (KPA / mantan anggota GAM), 4. Tokoh Masyarakat, 5. Anggota Masyarakat.

C.6.1. Aparat Pemerintahan

C.6.2. Aparat Keamanan

Aparat keamanan berkepentingan dengan pengamanan lokasi pengeboran karena sensitivitas wilayah yang digali. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, dikatakan bahwa perusahaan perlu membina hubungan baik dengan aparat keamanan ini (dengan Koramil, Kodim, Kapolsek, dan Kapolres). Terkait dengan kondisi perdamaian yang telah sangat kondusif di Provinsi Aceh, maka untuk anggaran biaya keamanan relatif jauh berkurang jika dibandingkan di masa konflik. Apabila di masa konflik terdapat begitu banyak pos militer di hampir setiap wilayah Aceh, maka setelah konflik berakhir, pos-pos militer telah direposisi.

C.6.3. Komite Peralihan Aceh (KPA)

Selain aparat keamanan, tokoh masyarakat yang diwawancarai juga menyatakan perlunya membina hubungan dengan KPA (organisasi eks. GAM). Salah seorang informan kami menyatakan perlunya melapor kepada KPA sebelum memulai kegiatan. Pembentukan KPA di tingkat kecamatan diistilahkan Sagoe, yang bertanggung jawab kepada KPA Wilayah (setingkat Kabupaten, namun struktur yang dipahami GAM sebagai teritori masa lalu).

C.6.4. Tokoh Masyarakat

Tokoh – tokoh masyarakat tradisional yang terdapat di sekitar lokasi studi di antaranya meliputi Geuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut, Tuha Lapan, Kepala Dusun, Forum Desa, Tuan Tanah, Toke Bangku, Kelompok Pemuda, Kelompok Wirid (pengajian),

Selain pembagian hasil, para tokoh masyarakat itu juga berharap agar perusahaan tidak melakukan langkah “*habis manis sepah dibuang*” seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan di masa lalu. Diharapkan agar perusahaan mampu membuat program – program pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tidak tergantung pada perusahaan. Program pemberdayaan masyarakat (community development) adalah program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi rakyat, dan bukan bantuan yang bersifat tentatif dan parsial, karena itu dianggap sebagai *cash program*. Hal itu disebabkan karena

tidak adanya program pemberdayaan masyarakat. Setelah berhenti beroperasi, maka masyarakat yang sebelumnya bekerja di perusahaan tersebut menjadi pengangguran. Adapun masyarakat lainnya tetap berada dalam kemiskinan. Hal ini sangat ironis mengingat kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi.

C.6.5. Tuan Tanah/ Saudagar lokal

Bagi sebagian tuan tanah/ saudagar lokal atau sering juga dikenal dengan orang kaya, prospek eksploitasi minyak dan gas yang diamati juga memiliki arti tersendiri. Bagi mereka kehadiran perusahaan pengolahan gas atau minyak berarti membuka peluang usaha. Bagi tuan tanah upaya pengolahan sumberdaya alam berupa gas dan minyak berarti ada kemungkinan penjualan tanah guna mendukung kelancaran aktivitas. Penjualan tanah ini berarti adanya kemungkinan keuntungan. Bagi saudagar lokal, kehadiran perusahaan yang akan mengolah gas dan minyak berarti membuka peluang usaha baru yang artinya bakal ada keuntungan. Bagi mereka, siapapun yang mengelola sumberdaya alam tidak menjadi masalah selama bisa memberi jaminan usaha dan dan keuntungan kepada masyarakat.

C.6.6. Anggota Masyarakat

Warga masyarakat yang dijumpai merasa sangat antusias dengan rencana eksplorasi di wilayah mereka. Mereka berharap akan memperoleh pekerjaan di perusahaan apabila kemudian telah beroperasi. Dengan harapan masyarakat yang begitu besar, maka perusahaan perlu memberikan penjelasan kepada mereka mengenai keterbatasan posisi yang tersedia apabila perusahaan jadi melakukan pengeboran di wilayah itu. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan program CD di daerah tersebut agar penduduk memiliki lapangan usaha sendiri yang pada akhirnya mereka tidak perlu terlalu tergantung kepada perusahaan.

Apabila perusahaan hendak melakukan perekrutan karyawan dari kalangan masyarakat, maka perusahaan perlu membuat semacam kepanitiaan kecil yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat. Panitia ini bertugas melakukan seleksi calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dengan adanya kepanitiaan ini diharapkan dapat meminimalisasi konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi apabila perusahaan melakukan perekrutan sendiri.

C.7. Masyarakat Menilai Tanah/ Lahan

Bagi masyarakat Bireuen yang dikaji, tanah merupakan sumberdaya produksi yang sangat berarti. Banyaknya anggota masyarakat yang hidupnya sangat tergantung dari pengelolaan tanah sudah menunjukkan bahwa tanah merupakan sebuah nilai yang tidak jarang juga menjadi landasan bagi pembentukan stratifikasi sosial di masyarakat. Hampir semua masyarakat mengatakan bahwa tanah adalah harta yang sangat berarti.

Berkaitan dengan upaya pengolahan sumberdaya alam (gas dan minyak) yang membutuhkan lahan sebagai sarana pendukungnya, sebagian masyarakat tidak merasa keberatan bila harus melepaskannya. Pembayaran seharusnya dilakukan dengan nilai produktif dari tanah, dan bukan dari status pemilik tanah. Jangan ada diskriminasi terhadap pembayaran tanah. Filosofi inilah kiranya yang mendorong penduduk untuk dengan mudah melepaskan tanahnya jika diperlukan untuk memperlancar proses pengolahan sumber daya alam. Bagi masyarakat harga tanah tidak akan menjadi persoalan selama pemerintah atau siapapun memberi peluang pada masyarakat untuk turut serta memperoleh keuntungan dari kegiatan pengolahan yang mempergunakan tanah mereka sebagai sarana pendukung.

Penduduk akan merasa dirugikan bila harga jual tanah dipengaruhi oleh status sosial pemilik tanah dan bukan status kesuburan atau produktivitas tanah itu. Kecuali itu sebagai besar penduduk juga berharap seandainya harus terjadi pembebasan lahan, maka penduduk harus secara langsung dilibatkan sebagai pihak yang berkepentingan dan bukan melalui pihak ketiga.

Seperti kebanyakan daerah lainnya di Aceh, yang dikaji tidak diperoleh adanya tanah yang merupakan hak ulayat. Tanah-tanah yang dianggap milik bersama yang kalau dipergunakan harus dengan ijin masyarakat biasanya adalah tanah pemakaman, tanah meunasah/mesjid/balee dan lainnya. Bila yang terkena adalah tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan tersebut pada dasarnya masyarakat tidak merasa keberatan untuk ditukar guling asal dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan tetap berprinsip pada rasa keadilan dan proporsionalitas.

D. KOTA SABANG

D.1. Gambaran Umum Kota Sabang Geografis

Kota Sabang terletak antara 5°46'28" hingga 5°54'28" Lintang Utara dan 95°13'12" hingga 95°22'36" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 28 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya terdiri dari lima pulau, yaitu pulau Weh (Sabang), Pulau Rondo, Pulau Rubiah, Pulau Ceulako dan Pulau Klah. Adapun batas-batas wilayahnya, sebelah utara dan timur berbatasan dengan selat Malaka, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan samudra Indonesia. Karena wilayah Kota Sabang merupakan daerah kepulauan, maka secara geologis hampir seluruh daratannya (yaitu 87 persen) berupa batuan, baik berupa batuan

vulkanis dan batuan sediment. Sedangkan sisanya, yaitu 13 persen daratannya terbentuk dari endapan alluvial. Dengan keadaan geologis yang demikian, maka wajar jika Kota Sabang hampir tidak mempunyai lahan sawah. Lahan di Kota Sabang didominasi oleh kebun yang luasnya mencapai 10.709,26 hektar.

Dengan luas secara keseluruhan 153 km², Kota Sabang dibagi dalam 2 kecamatan dengan 18 Kelurahan secara keseluruhan, 7 mukim dan 72 lingkungan. Karena wilayah yang merupakan pulau kecil, pada tahun 2010, rata-rata tekanan udara di Kota Sabang mencapai 1.010,03 mb dan suhu udara 27,6°C tiap bulannya.⁶⁹

Demografi / Kependudukan

Penduduk Kota Sabang pada tahun 2010 adalah sebesar 30.653 jiwa yang terdiri dari 15.580 laki-laki dan 15.067 perempuan, sehingga rasio jenis kelaminnya adalah sebesar 104. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2009, penduduk Sabang bertambah sebesar 2,17 persen dengan kepadatan penduduk sekitar 200 jiwa/km². Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan oleh Disnaker Kota Sabang tahun 2010 adalah sebanyak 1.045 orang (605 laki-laki, 440 perempuan).⁷⁰

D.2. Kesehatan

Pada tahun 2010 di Kota Sabang, terdapat 2 buah rumah sakit (RS), 6 puskesmas dan 11 puskesmas pembantu, selain juga beberapa tempat dokter praktek. Sedangkan fasilitas posyandu ada sebanyak 35 tempat.⁷¹

D.3. Pendidikan

Pada tahun 2010, di Kota Sabang terdapat 34 sekolah dasar(SD)/sederajat termasuk 1 Sekolah Dasar Luar Biasa(SDLB) yang menampung 3.747 murid dengan guru sebanyak 432 orang. Untuk sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat terdapat 11 sekolah yang menampung 1.418 murid dengan guru sebanyak 256 orang, dan 5 sekolah menengah atas (SMA)/sederajat yang menampung 1.251 murid dengan 196 guru. Sedangkan untuk taman kanak-kanak (TK) ada sebanyak 12 sekolah dengan 664 murid, 48 guru dan 29 kelas.⁷²

D.4. Kondisi Pemerintahan

Jumlah Anggota DPRK Sabang pada 2010 sebanyak 20 orang, didominasi Partai Aceh 7 orang, Partai Golkar 4 orang, wakil 3 partai lainnya bergabung dalam satu fraksi berjumlah 9 orang. Detailnya adalah sebagaimana tabel berikut:⁷³

⁶⁹ Sumber data primer hasil observasi dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kota Sabang

⁷⁰ Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sabang

⁷¹ Sumber: Dinas Kesehatan Sabang

⁷² Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sabang

⁷³ Sumber: Sekretariat DPRK Sabang

Tabel 1. Banyaknya Anggota DPRK Sabang Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2010

Partai Politik		Anggota			Persentase
		L	P	Jumlah	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A. Fraksi					
1.	Partai Aceh (PA)	7	0	7	35
2.	Partai Golkar	3	1	4	20
3.	Bintang Bulan, Amanat, Demokrat Sejahtera	8	1	9	45
Jumlah Anggota Fraksi		19	1	20	100
B. Fraksi Komisi					
4.	Komisi "A" (Bidang Pemerintahan)	3	1	4	23,53
5.	Komisi "B" (Bidang Perekonomian)	5	0	5	29,41
6.	Komisi "C" (Bidang Keuangan)	4	0	4	23,53
7.	Komisi „D" (Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat)	3	1	4	23,53
Jumlah Fraksi		15	2	17	100

D.5. Ekonomi dan ekologi Kota Sabang Saat ini

Secara umum masyarakat Sabang bekerja di sektor ekonomi riil. Yang paling dominan adalah nelayan/melaut (40 persen). Kemudian berturut-turut perkebunan (kakao cengkeh, kopra, sayur-mayur), PNS (20 persen), dan sisanya jasa (perhotelan, transportasi, souvenir, air minum).

Sektor jasa di Sabang belum berkembang , karena infrastruktur yang masih belum berkembang. Selama ini PAD dari sektor jasa hanya menyumbang 15 persen dari total PAD. Sabang tidak maju karena tidak ada perencanaan. Dari dulu situasi Sabang masih seperti hari ini. Sektor pelayanan publik pun demikian. Air PAM hanya hidup dua hari sekali. Pelaksanaan pariwisata tidak berkembang karena belum menyentuh sektor ekonomi rakyat.

Sebab kompetisi ekonomi kurang terpacu, dan ini bukan hanya berhubungan ekonomi semata, tapi juga aspek sosial-politik. Masyarakat Sabang cenderung apatis, karena menganggap bahwa siapa pun yang menjadi pemimpin tidak tahu dari mana jalan mengembangkan Sabang.

Dalam hal kenyamanan berusaha di Sabang, masih sangat baik. Bahkan antara tokoh agama dan berandalan bisa saling menghormati. Sabang sebagai sebuah pulau kecil dengan 18 gampong dan dua kecamatan sudah dianggap sebagai sebuah keluarga.

Nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan ekonomi begitu tingginya di Sabang, sehingga muncul peribahasa, “Sabang hana pre, sabe hana prang”. Artinya Sabang tidak ada yang gratis, semuanya harus beli, tidak ada model ekonomi barter. Namun demikian setiap saat Sabang juga tidak ada peperangan. Ketika Aceh daratan berkonflik, Sabang tetap aman dan tidak terpengaruh.

Dalam dunia pendidikan, sebenarnya potensi anak-anak Sabang yang pernah melanjutkan pendidikan di luar pulau lebih berkualitas potensinya. Namun sebagian besar dari mereka tidak mau kembali ke Sabang. Ini juga masalah dalam mengembangkan Sabang. Itu pula yang menyebabkan orang Sabang tidak terlalu usil jika ada pendatang yang akhirnya memimpin Sabang. Contoh walikota dan wakil walikota yang lalu bukan orang Sabang. Masyarakat Sabang tidak usil. Mereka tidak pernah mempermasalahkan apakah putera asli daerah atau bukan.⁷⁴

Perekonomian masyarakat Sabang biasa-biasa saja, masyarakat hanya ingin situasi kondusif dalam berusaha dan tidak ingin berkonflik. Masyarakat Sabang memiliki solidaritas sangat tinggi. Di Sabang ini biasa saja kita mencegat mobil siapa pun untuk menumpang, misalnya mau pergi ke pasar. Ada perasaan bahwa Sabang itu satu keluarga. Demikian pula dalam penampilan. Kita tidak dapat membedakan mana istri pejabat dengan orang biasa. Istri pejabat tidak berpikir untuk berpenampilan menonjol karena bagi mereka berpikir hal itu menyakiti perasaan masyarakat umum. Tidak ada pejabat yang pamer kemewahan di Sabang.⁷⁵

E. PENUTUP

Rekomendasi dan saran

1. Dari hasil observasi, wawancara dan FGD, masyarakat di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Kota Sabang menginginkan pembangunan berkelanjutan yang terarah. Mereka pada prinsipnya sangat mendukung kalau ada perusahaan yang akan melakukan eksploitasi dan eksplorasi di wilayahnya. Dengan harapan dilakukan koordinasi dengan semua stakeholders. Perlu pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan agama, termasuk KPA (eks. GAM) dalam memusyawarahkan kepentingan daerah. KPA tidak dapat disamakan dengan TNI/Polri, walau pun saat ini peta kelompok keamanan memasukkan KPA.
2. Adanya perhatian kepada fasilitas publik vital, seperti perbaikan jalan, kuala/TPI/PPI/pelabuhan, sarana pendidikan, dan agama. Mengingat kondisinya fasilitas umum di empat Kabupaten Kota sangat menyedihkan dibandingkan dengan daerah lain terutama daerah pesisir.

⁷⁴ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Salman Arifin (Kadis Kemenag Sabang), 9 Juni 2012

⁷⁵ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Seniwati (Ketua KIP Sabang), 9 Juni 2012

3. Masyarakat tidak akan menuntut yang berlebihan. Mereka akan bersedia menerima pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidikan mereka.
4. Masyarakat juga mengharapkan, adanya program-program pengembangan ekonomi yang berbasis ekologi. Dengan program Community Development dari perusahaan, terutama masyarakat nelayan, pelaut dan petani tambak.
5. Mereka menerima siapapun yang masuk, tidak memedulikan apakah dari perusahaan asing atau nasional, asal memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.
6. Selain itu, mesti ada perhatian kepada aspek lingkungan terutama AMDAL-nya, jangan sampai merusak lingkungan.
7. Proses masuk ke daerah Aceh harus dilakukan dengan pendekatan adat. "Harus ada tata krama dan "Asalamualaikum",
8. Bagusnya ada momentum; sesuatu yang bisa diingat masyarakat sebagai pengenalan dan sosialisasi keberadaan investor kepada masyarakat, seperti dalam bentuk keunduri raya -pesta besar- dengan anak yatim dan lain-lain. Ada pendekatan cultural.
9. Jika ingin dibentuk Forum Masyarakat, penting untuk mematangkan gagasan tersebut ke dalam beberapa pertemuan sehingga berhasil dikumpulkan representasi sosial-ekonomi - politik yang lebih luas. Dasar pemikirannya agar legitimasi forum benar-benar kuat, dan tidak dipertentangkan oleh kelompok lain. Forum harus merupakan gabungan representasi tokoh formal dan informal.
10. Sangat penting berargumentasi dengan kode-kode komunikasi agama dan adat, karena masyarakat Aceh mudah tersentuh dengan pendekatan ini. Jangan perlihatkan gaya dan penampilan yang kebarat-baratan. Bagi perempuan, meskipun tidak menggunakan jilbab, selayaknya tetap menggunakan selendang dan baju panjang. Jangan gunakan tangan kiri untuk menyapa, dan menggunakan tangan kiri untuk berinteraksi dengan orang lain.

LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara dan FGD
2. Hasil Observasi
3. Foto Dokumentasi Studi